BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perkebunan sebagai bagian integral dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional merupakan salah satu potensi strategis dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan pemeliharaan daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke-generasi. Pada Tahun 2015-2019, sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat terbarukan, berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah-kaidah konservasi.

Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, juga menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat yang berat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal perencanaan dan penganggaran diamanatkan mengikuti pembagian kewenangan pusat dan daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembangunan.

Undang-undang tersebut memasukkan bidang-bidang terkait sub sektor perkebunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah seperti tenaga kerja, statistik, pemberdayaan masyarakat dan desa, pangan, lingkungan hidup dan pertanahan sebagai urusan wajib yang tidak terkait pelayanan. lmplikasi penetapan urusan pertanian sebagai urusan pemerintah bersifat pilihan khususnya sub sektor perkebunan yang memiliki kekhasan komoditas sesuai potensi unggulan daerah adalah akan membuka peluang negosiasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menentukan pembagian kewenangan sub sektor perkebunan yang tepat dan disesuaikan dengan kebijakan program, anggaran dan regulasi yang efektif dan efisien.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah, diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memadai. SAKIP yang memadai harus mengandung unsur Perencanaan Kinerja (Renstra, RKT, PK), Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Pemanfaatan Informasi Kinerja. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai salah satu unsur penting dalam SAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Format yang terdiri dari: 1) Ikhtisar Eksekutif; 2) Bab I Pendahuluan; 3) Bab II Perencanaan Kinerja; 4) Bab III Akuntabilitas Kinerja yang meliputi: (a) Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja; (b) Realisasi Anggaran yang digunakan dan telah digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja; 5) Bab IV Penutup dan Lampiran. Didalam Bab III diwajibkan membahas 1) capaian terhadap target tahun ini; 2) capaian kinerja dibandingkan dengan tahun lalu/beberapa tahun sebelumnya; 3) capaian kinerja terhadap Rentra dan PK; 4) membandingkan capaian kinerja dengan standar Nasional; 5) analisis keberhasilan dan penyebab kegagalan; analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya; 7) analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

1.2. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Pertanian terkait nomenklatur organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan, dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai **tugas**

"perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi dan produktivitas tebu dan tanaman perkebunan standarisasi teknis di bidang perkebunan". Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan **fungsi**:

1) Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan, pengolahan, pemasaran hasil, pengembangan bahan baku bio energi, pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan;

6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perbenihan, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

   a. Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerjasama di bidang perkebunan;
   b. Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c. Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
   d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan serta pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan;
   e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

2) Direktorat Perbenihan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih tebu dan tanaman perkebunan lain. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perbenihan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagaan benih;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih;
c) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian varietas dan pengawasan mutu benih, peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penguatan lembaga benih;

f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbenihan Perkebunan.

3) Direktorat Tanaman Semusim dan rempah, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan produksi tanaman tebu, semusim dan rempah lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Semusim menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

d. Pengembangan bahan baku bio energi tanaman tebu;

e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi, tanaman tebu dan pemanis lainnya, serat

dan atsiri, lada, pala dan cengkeh, serta rempah dan semusim lainnya; dan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Semusim dan rempah.

4) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;
d. Pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit;
e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain, serta tanaman penyegar;

f. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar.

5) Direktorat Perlindungan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
d. Pelaksanan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta

penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

f. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
h. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

6) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

b. Pelaksanan kebijakan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pasca panen, pengolahan, standardisasi, penerapan standar mutu, dan pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;
f. Koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta penerapan standar mutu di bidang perkebunan; dan
g. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

7) UPT Pusat yang berada di daerah sebanyak 4 UPT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 08,09,10,11/Permentan /OT.140/2/2008, tanggal 9 Pebruari 2008 yaitu: BBPPTP Surabaya, BBPPTP Medan, dan BBPPTP Ambon. yang statusnya setara Eselon II.b dan BPTP Pontianak statusnya setara Eselon III.a.

Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Semusim dan rempah, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Sedangkan untuk Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan.

Tugas pokok BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon adalah melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Sedangkan BPTP Pontianak mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, BBPPTP Surabaya, Medan, dan Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;

b. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan di ekspor, serta rekayasa genetika;
c. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
d. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
e. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
f. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi;
g. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*referee fest*);
h. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
i. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
j. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
k. Pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
l. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
m. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;

n. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan , penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
o. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
p. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
q. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
r. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
s. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
t. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
u. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
v. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan BPTP Pontianak dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
b. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;

c. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
d. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
e. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
f. Pelaksanaan eksplorasi dan iventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
g. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan;
h. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
i. Pelaksanaan pengujian dan pemanfaatan pestisida nabati;
j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan;
l. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
m. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Mencermati isu-isu strategis sebagaimana diungkapkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 yang meliputi bidang ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, kewilayahan dan kedaerahan serta bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, maka tantangan ke depan yang akan dihadapi dalam membangun perkebunan secara garis besar dikelompokkan menjadi 1) tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup global; 2) tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup sektor pertanian dan 3) tantangan pembangunan perkebunan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan.

1.3.1. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Global

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup global terutama berkaitan dengan liberalisasi pasar global yang dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);

4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);
6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku);
7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar)

1.3.2. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sektor Pertanian

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sektor pertanian terutama berkaitan dengan kondisi pertanian secara umum dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Kondisi keberlangsungan kelembagaan petani/pekebun (implikasi lemahnya posisi tawar lembaga petani/pekebun);
2. Penurunan minat generasi muda terhadap budidaya pertanian/ perkebunan (implikasi terbatasnya sumber daya insani (SOl) pertanian/perkebunan);
3. Kondisi permodalan dan akses kredit usaha (implikasi pengembangan usaha agribisnis pertanian/ perkebunan);
4. Dukungan ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian/ perkebunan (implikasi terhadap daya dukung usaha agribisnis pertanian/ perkebunan);

5. Penurunan kehilangan hasil (implikasi penanganan pascapanen yang baik);
6. Kecukupan pangan bergantung impor (implikasi kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan);
7. Desentralisasi pengembangan pertanian/ perkebunan (implikasi dari pemusatan pembangunan pertanian/ perkebunan di Pulau Jawa);
8. Tuntutan atas penerapan otonomi daerah (implikasi terhadap pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota);
9. Ketidaksinambungan kebijakan/ regulasi serta koordinasi lintas sektoral dan daerah (implikasi tumpang tindih kebijakan/ regulasi lintas sektor).

1.3.3. Tantangan Pembangunan Perkebunan dalam Ruang Lingkup Sub Sektor Perkebunan

Tantangan yang akan dihadapi pembangunan perkebunan ke depan dalam ruang lingkup sub sektor perkebunan terutama berkaitan dengan kondisi perkebunan secara khusus dari aspek hulu dan hilir dapat diklasifikasikan yaitu:

1. Ketersediaan benih dan sarana produksi (implikasi peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan);
2. Keterbatasan, penurunan kualitas, status kepemilikan, persaingan pemanfaatan, degradasi dan konversi/ alih fungsi lahan (implikasi permasalahan umum sumber daya lahan berkelanjutan);

3. Pemberdayaan pekebun (implikasi peningkatan kemampuan pekebun dalam usaha agribisnis perkebunan);
4. Kondisi pertanaman perkebunan (implikasi banyaknya tanaman tua dan tanaman dengan produktivitas rendah);
5. Anomali Iklim sebagai penyebab tidak stabilnya jadwal tanam dan jadwal panen.
5. Tuntutan penerapan konsep pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (implikasi dari pemberlakuan ISPO);
6. Tuntutan pengaturan perizinan usaha perkebunan (implikasi reformasi birokrasi perizinan dalam era otonomi daerah);
7. Konflik dan gangguan usaha perkebunan (implikasi keamanan, kenyamanan berusaha serta penciptaan minat dan iklim investasi).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Arah kebijakan umum pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah 1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; 2) meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan; 3) mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; 4) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan penanganan perubahan iklim; 5) penyiapan landasan pembangunan yang kokoh; 6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; dan 7) mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan 9 Agenda Prioritas NAWACITA sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Amanat pembangunan nasional dalam 9 Agenda Prioritas NAWACITA yang wajib dilaksanakan Ditjen. Perkebunan dalam pengembangan perkebunan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam RPJMN

2015-2019 mencakup 2 agenda prioritas diantaranya 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional dengan sub agenda prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan; dan 2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda peningkatan kedaulatan pangan. Selain itu agenda prioritas terkait membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah (perbatasan, daerah tertinggal dan daerah kawasan timur Indonesia) dan desa dalam kerangka negara kesatuan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan diprioritaskan Ditjen. Perkebunan melalui kegiatan sistematik.

Sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan *agroindustry* adalah peningkatan produksi komoditas andalan dan prospektif ekspor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kakao, teh, kopi dan kelapa serta mendorong berkembangnya agroindustri di perdesaan. Sedangkan sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan adalah tercapainya peningkatan ketersediaan pangan dari tebu yang bersumber dari produksi dalam negeri untuk memenuhi konsumsi gula rumah tangga dan industri rumah tangga.

Secara umum pengembangan komoditas perkebunan difokuskan pada 16 komoditas unggulan yaitu Tebu, Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam. Penentuan komoditas tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditas tanaman binaan Direktorat Jenderal

Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang perubahan lampiran I dari Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006. Arah pengembangan komoditas-komoditas tersebut dicapai melalui program peningkatan produksi dan produktivitas dengan implementasi kegiatan seperti rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan dan pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha, pengolahan produksi, pemasaran produksi dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas di bidang manajemen dan kesekretariatan. Komoditas-komoditas unggulan perkebunan yang masih dalam tahap inisiasi tetap dikembangkan dan difasilitasi Ditjen. Perkebunan yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) yang meliputi penyediaan benih/ varietas unggul, pembangunan/ pemeliharaan kebun sumber benih (demplot, kebun induk, kebun entres dan lain-lain), pengendalian OPT, pasca panen, pengolahan dan pemasaran, pemberdayaan pekebun, peningkatan kapasitas sumber daya insani (SDI) dan penguatan kelembagaan.

Sasaran strategis Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 yang selaras dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah mendukung: 1) peningkatan produksi gula; 2) pengembangan komoditas bernilai tambah; 3) penyediaan bahan baku bioindustri dan bio energi; 4) peningkatan sumberdaya insani; 5) peningkatan kualitas aparatur dan

layanan kelembagaan pertanian; 6) peningkatan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian; 7) peningkatan pendapatan petani.

2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015- 2019 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" dan Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu "Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun".

2.1.2. Misi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan ditetapkan sebagai berikut:

1) Mewujudkan peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan.
2) Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan.
3) Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.

4) Menyediakan fasilitas pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
5) Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
6) Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan.
7) Mendorong upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
8) Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
9) Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.
10) Mendorong pengembangan produk perkebunan di tataran domestik dan internasional yang berkualitas dan berdaya saing.

2.1.3. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Mengacu pada sasaran utama serta analisis yang hendak dicapai serta mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia kedepan, maka tujuan pembangunan nasional diimplementasikan ke dalam arah kebijakan umum untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka menengah Tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan

Tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan Visi, Misi serta tugas dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1) Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/pengolahan/pascapanen serta pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
2) Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum, humas, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
3) Memfasilitasi penyediaan/ pengadaan alat pascapanen dan alat pengolahan tanaman semusim dan rempah, serta tanaman tahunan dan penyegar yang spesifik lokasi dan fungsi yang didukung penyediaan teknologi berkualitas dan aplikatif bagi pekebun.
4) Melakukan upaya strategis dalam mempfasilitasi penerapan pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan, perizinan, usaha perkebunan, penilaian usaha perkebunan serta inventarisasi, identifikasi dan penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan.
5) Memfasilitasi ketersediaan teknologi perlindungan pekebunan, pengamatan, Pemantauan dan pengendalian organisme pengangu

tanaman (OPT), pencegahan kebakaran lahan/kebun dan penanganan dampak perubahan iklim.

6) Melakukan pengembangan komoditas unggulan perkebunan pada lahan-lahan eksisting dan lahan bukaan baru sesuai potensi kearifan lokal, kebutuhan pengembangan kawasan dan kesiapan daerah pengembangan melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi antar sektor dan memperhatikan kelayakan ekonomi, agroekosistem, sosial, pasar dan pengembangan/ potensi berkelanjutan.
7) Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan kelompok petani tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar melalui pelatihan penumbuhan kebersamaan/dinamika kelompok, pelatihan penguatan kelembagaan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana prasarana budidaya, dukungan penyediaan fasilitasi pembiayaan dan permodalan serta kemudahan akses ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.
8) Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pendampingan kepada pekebun dalam mendorong usaha agribisnis perkebunan dibudidayakan melalui sistem budidaya perkebunan yang baik, berkelanjutan dan memperhatikan isu-isu lingkungan terutama dalam penggunaan benih dan sarana produksi (pupuk dan pestisida).
9) Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industry melalui pendekatan zero waste management.

10)Melakukan upaya dalam memfasilitasi pengembangan pemasaran produk unggulan perkebunan yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilisasi harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerjasama komoditas.

2.1.4. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Arah kebijakan Pembangunan Perkebunan ditetapkan Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 dan kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 ditetapkan menjadi **Arah Kebijakan Umum** dan **Arah Kebijakan Khusus**.

Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, Arah kebijakan umum Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Pengembangan komoditas perkebunan strategis
   a. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan perkebunan berdasarkan fungsi
   b. Kebijakan penerapan budidaya yang abaik (GAP)
   c. Kebijakan perkaretan Internasional (ITRC)
   d. Kebijakan sinergitas BPDP kelapa sawit dan peremajaan kelapa sawit rakyat

e. Kebijakan moratorium Alih Fungsi Hutan Alam dikonversi menjadi lahan perkenbunan kelapa sawit
f. Kebijakan penanganan standarisasi mutu dan pembinaan usaha perkebunan.

2. Pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan

   Arah kebijakan ini dimaksudkan sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian yang mengamatkan penetapan kawasan pertanian nasional termasuk kawasan perkebunan.

A**rah kebijakan khusus** adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu:

1. Pemenuhan penyediaan bahan baku tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional.
2. Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan.
3. Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry.
4. Pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan.
5. Penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik.
7. Peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.5. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditetapkan 9 agenda prioritas NAWACITA yang menunjukkan sasaran prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan agenda prioritas NAWACITA yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik melalui peningkatan kedaulatan pangan dengan sasaran produksi gula Tahun 2019 mencapai 3,8 juta ton. Selain itu agenda prioritas terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan agroindustri berbasis komoditas perkebunan dengan sasaran produksi Tahun 2019 untuk komoditas kelapa sawit sebesar 36,42 juta ton CPO; komoditas karet sebesar 3,81 juta ton karet kering; komoditas kakao sebesar 961 ribu ton biji kering; komoditas teh sebesar 162,7 ribu ton daun kering; komoditas kopi sebesar 778 ribu ton kopi berasan; dan komoditas kelapa sebesar 3,49 juta ton setara kopra.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis nasional dan sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, sesuai tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sasaran strategisnya untuk periode 2015-2019 yang difokuskan pada peningkatan produksi dan produktivitas 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional perkebunan. Implementasi dukungan

Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam pencapaian 7 sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 yaitu:

a. Sasaran Startegis Utama meliputi: 1) pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan yang difokuskan pada pengembangan produk segar dan olahan dari 16 komoditas unggulan perkebunan; 3) pemenuhan penyediaan bahan baku *bio-energy* dan pengembangan fondasi sistem pertanian *bio-industry* dengan fokus pengembangankomoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpangsari dengan komoditas pertanian lainnya serta penyediaan benih kemiri sunan.
b. Sasaran Strategis pendukung meliputi: 1) peningkatan kualitas sumberdaya insani perkebunan; 2) penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan; 3) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang bauk dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabiitas, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integrasi/komitmen kejujuran, konsistensi dan bebas KKN dilingkungan organisasi Ditjen Perkebunan; 4) peningkatan pendapatan keluarga pekebun yang merupakan resultan dari pencapaian sasaran strategis.

Strategi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian arah dan kebijakan pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang

ditetapkan Direktorat Jenderal Perkebunan. Strategi pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang dapat dibagi menjadi **Strategi Umum** dan **Strategi Khusus**.

8. Strategi umum dirumuskan dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan, sedangkan strategi khusus adalah strategi pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian 6 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019. Strategi Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam pencapaian 7 sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 diantaranya meliputi: *1) strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional; 2) strategi* Peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan; 3) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry; 4) Strategi pengembangan sumber daya insani (SDI) perkebunan; 5) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan; 6) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan yang baik; 7) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

Strategi umum pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:

1) Strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis;
2) Strategi pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan unggulan nasional;

3) Strategi pengembangan dann penguatan sistem pembiayaan perkebunan;
4) Strategi pengembangan sarana prasarana dan infrastruktur pendukung usaha perkebunan;
5) Strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6) Strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan;
7) Strategi peningkatan penerapan dan penanganan pascapanen, pengolahan dan fasilitasi pemasaran komoditas perkebunan
8) Strategi dukungan pengelolaan dan pelaksanaan program tematik pembangunan perkebunan;
9) Strategi penguatan tata ketota kepemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi sebagai dasar petayanan prima;

Strategi khusus pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang adalah:

1) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku Tebu dalam rangka peningkatan produksi gula nasional;
2) Strategi peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing komoditas perkebunan;
3) Strategi pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energy dan pengembangan fondasi sistem pertanian bio-industry;
4) Strategi pengembangan sumberdaya insani pekebunan (SDI);
5) Strategi penguatan kelembagaan pekebun dan kemitraan usaha perkebunan;
6) Strategi akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik;

7) Strategi peningkatan pendapatan keluarga pekebun.

2.1.6. Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Pembangunan perkebunan saat ini dan di masa yang akan datang menghadapi tantangan yang cukup berat baik dalam tataran liberalisasi perdagangan global maupun lingkup regional. terutama memasuki era AEC (*Asean Economic Community*) Tahun 2015. Tuntutan pembangunan perkebunan di era AEC adalah bagaimana strategi pengembangan komoditas perkebunan yang berkelanjutan, berdaya saing baik kuantitas maupun kualitas dan ramah lingkungan serta mampu memecahkan masalah kesenjangan ekonomi (kemiskinan dan pengangguran). Selain itu bagaimana masalah pemerataan pembangunan perkebunan dan kesejahteraan pekebun perlu benar-benar menjadi prioritas program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019. Keberhasilan pembangunan perkebunan di era AEC yang penuh persaingan ini tidak hanya memerlukan "**keterpaduan**" seluruh potensi sumber daya (SDI dan SDA) yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan tetapi yang justru lebih penting adalah bagaimana "**kebersamaan dan keterbukaan**" dari para stakeholder Pusat-Daerah dan masyarakat pekebun dalam menjaga "**kedaulatan dan kemandirian**" NKRI di tengah serbuan investasi asing dan produk-produk negara lain sehingga diperlukan pengamanan pasar domestik yang "**berefisiensi keadilan**" dan berbasis "**kearifan lokal**" untuk meningkatkan daya saing dan penguatan ekspor komoditas perkebunan agar mampu mencapai tujuan "**kebermanfatan dan keberlanjutan**" bagi perekonomian nasional dan "**kelestarian lingkungan hidup**".

Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai surat edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009, setiap unit Eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja unit Eselon I adalah *outcome* dan indikator kinerja unit Eselon II adalah *output*.

Sesuai hasil analisis terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pembangunan perkebunan ditetapkan bahwa program pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah "***peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan***" dengan 2 Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu 1) laju peningkatan produksi tanaman tebu dan 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya. Adapun proyeksi Indikator Kinerja Program Ditjen. Perkebunan Tahun 2015-2019, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Program (IKP) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan tahun 2015-2019

No.	Indikator	Target IKP per tahun					Rata- rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Laju peningkatan produksi tanaman tebu (%)	12,91	10,03	7,03	4,57	4,37	**7,78**
2.	Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya (%)	16,35	2,45	2,9	2,89	2,86	**5,49**

Sumber: Ditjen. Perkebunan, 2017.

Pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata proyeksi IKP laju peningkatan produksi tanaman tebu diproyeksikan selama Tahun 2015-2019 sebesar 7,78%, sedangkan rata-rata proyeksi IKP laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya diproyeksikan selama Tahun 2015-2019 sebesar 5,49%. Untuk mencapai proyeksi tersebut, program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 lebih diprioritaskan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman unggulan perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan, pembangunan/ pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan serta pemberian pelayanan berkualitas.

Fasilitasi dan pembinaan baik dukungan kegiatan, pembinaan/ pengawalan/pendampingan, regulasi dan pendanaan di daerah perlu didukung oleh Pemerintah Daerah setempat melalui SKPD yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota terhadap komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing masing selain dukungan terhadap pengembangan 16 komoditas unggulan perkebunan yang ditetapkan dalam Renstra ini yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala, Tebu dan Cengkeh, Jambu Mete, Sagu, Kemiri Sunan, Kapas, Tembakau dan Nilam.

2.1.7. Agenda Prioritas NAWACITA Tahun 2015-2019

NAWACITA sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 mengamanatkan Kementerian Pertanian untuk berkewajiban dan

bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran pokok sub agenda prioritas peningkatan kedaulatan pangan dan peningkatan agroindustri Tahun 2015-2019.

Dari Agenda Prioritas NAWACITA sebagaimana diketahui yang dijabarkan lebih lanjut kedalam kegiatan prioritas dimana Ditjen. Perkebunan mendapat amanat untuk melaksanakan kegiatan prioritas Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1) *Pengembangan 150 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan*

Sasaran kegiatan prioritas ini adalah tercapainya 150 desa pertanian pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil tersertifikasi sampai dengan Tahun 2019 oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi. Berdasarkan hal tersebut, mulai Tahun 2016, Ditjen. Perkebunan memprioritaskan kegiatan desa organik ini pada tahap awal dengan melakukan pembinaan pada kelompok tani tentang bagaimana melakukan budidaya tanaman perkebunan organik sampai dengan fasilitasi sertifikasi organik berbasis kelompok tani pada lahan perkebunan tertentu.

2) *Perluasan areal perkebunan 150.000 hektar di lahan kering*

Perluasan areal perkebunan di lahan kering bertujuan untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lahan-lahan bukaan baru yang sesuai dengan agroekosistemnya dan dilahan-lahan sub optimal. Komoditas perkebunan yang diproyeksikan sampai dengan tahun 2019

seluas 150.000 hektar adalah komoditas cengkeh, kakao, kopi, lada, pala, tebu, jambu mete, karet, kelapa, kelapa sawit dan kemiri sunan.

3) Pengembangan food estate

Pengembangan food estate bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan/sentra pangan berbasis komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Pengembangan food estate dilaksanakan di daerah yang belum dapat dikategorikan sebagai daerah lumbung-lumbung pangan dan belum secara mandiri memenuhi pangan masyarakatnya. Pelaksanaan food estate bersamaan dalam mendukung kegiatan pengembangan 1 juta hektar kawasan pangan Merauke dan pengembangan rice estate dengan di Provinsi Kalimantan Barat (8 Kabupaten/Kota) seluas 120.000 hektar; Provinsi Kalimantan Tengah (14 Kabupaten/Kota) seluas 180.000 hektar; Provinsi Kalimantan Utara (Kabupaten Bulungan) seluas 10.000 hektar dan Provinsi Maluku (Kab. Kepulauan Aru) seluas 190.000 hektar.

4) Pengembangan kelapa sawit di wilayah perbatasan

Sasaran kegiatan ini adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat pada areal eksisting dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektar di perbatasan negara terutama di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur melalui pola PIR (perkebunan inti rakyat). Diharapkan melalui kegiatan ini dapat menarik investor untuk membangun industri hilir kelapa sawit di daerah perbatasan.

5) Pengembangan tebu dan inisiasi pembangunan pabrik gula baru

Pengembangan tebu dimaksudkan dalam mendukung pemenuhan bahan baku tebu untuk peningkatan produksi gula nasional 3,82 juta ton pada Tahun 2019 (pemenuhan gula Kristal putih/ GKP) melalui perluasan areal tebu 500.000 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan kegiatan inisiasi pembangunan pabrik gula baru dilakukan dengan merekomendasikan Kementerian/Lembaga terkait (BUMN, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan) dalam hal pemanfaatan lahan pengembangan tebu yang belum dilengkapi pabrik gula dengan target membangun/rehabilitasi 14 PG baru di Jawa & Luar Jawa.

6) Integrasi tanaman perkebunan dengan ternak sapi di lahan perkebunan kelapa sawit dan integrasi tanaman pangan di lahan perkebunan kelapa sawit

2.1.8. Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019

Sebagai penjabaran dari program, masing-masing unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9 (sembilan) kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yaitu:

(1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan kegiatan ***pengembangan tanaman semusim dan rempah***;

(2) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan ***pengembangan tanaman tahunan dan penyegar***;

(3) Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan perbenihan tanaman perkebunan***;

(4) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan***;

(5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan perlindungan perkebunan***;

(6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan kegiatan ***dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya***;

(7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan dengan kegiatan ***dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan***;

(8) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya ***dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan***;

(9) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon ***dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan***.

2.1.9. Kaitan Kegiatan Dengan Fokus Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019

Kaitan antara kegiatan pembangunan perkebunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dengan fokus kegiatan yang ditetapkan tercantum dalam Renstra Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

A. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Prioritas pengembangan tanaman semusim dan rempah difokuskan pada 7 komoditas unggulan perkebunan yaitu Tebu, Lada, Pala, Cengkeh, Kapas, Tembakau dan Nilam. Selain itu difasilitasi pengembangan

komoditas spesifik lokal seperti tanaman pemanis lain, tanaman serat, tanaman atsiri, tanaman rempah dan semusim lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman semusim dan rempah adalah **terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) *Pengembangan areal produktif tanaman tebu*, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain;
2) *Pengembangan areal produktif tanaman rempah* (Lada, Pala, Cengkeh, tanaman rempah dan tanaman atsiri lainnya), yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.
3) *Pengembangan areal produktif tanaman semusim lainnya* (kapas, tembakau, nilam, tanaman pemanis lain, tanaman serat dan semusim lain); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.
4) *Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim Lain; Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; dan Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri.
5) *Fasilitasi teknis pengembangan tanaman semusim dan rempah*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Tebu dan Pemanis Lain; Sub Direktorat Tanaman Rempah dan Semusim

Lain; Sub Direktorat Tanaman Lada, Pala dan Cengkeh; Sub Direktorat Tanaman Serat dan Atsiri; dan Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional.

B. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Prioritas pengembangan tanaman tahunan dan penyegar difokuskan pada 9 komoditas unggulan perkebunan yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, jambu mete, kemiri sunan, sagu, kakao, kopi dan teh. Selain itu difasilitasi pengembangan komoditas spesifik lokal seperti tanaman palma lain, tanaman penyegar lain dan tanaman tahunan lainnya. Sasaran peningkatan produksi tanaman tahunan dan penyegar adalah **terlaksananya pengembangan tanaman tahunan penyegar** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) *Pengembangan areal produktif tanaman kakao*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar.
2) *Pengembangan areal produktif tanaman tahunan* (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Jambu Mete, Kemiri sunan dan Sagu); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; dan Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain.
3) *Pengembangan areal produktif tanaman penyegar lainnya* (Kopi dan Teh); yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Penyegar.
4) *Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit;

Sub Direktorat Tanaman Penyegar dan Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain.

5) *Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Tanaman Karet dan Tanaman Tahunan lainnya; Sub Direktorat Tanaman Kelapa Sawit; Sub Direktorat Tanaman Penyegar; Sub Direktorat Tanaman Kelapa dan Palma lain; Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perbenihan tanaman perkebunan adalah **terlaksananya penyediaan benih unggul tanaman perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah;

1) *Pengembangan sumber benih unggul tanaman perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Benih Tanaman Semusim dan Rempah; dan Sub Direktorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar.
2) *Pengawasan mutu benih tanaman perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih.
3) *Pengembangan Kelembagaan Perbenihan Tanaman Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Kelembagaan Benih.
4) *Fasilitasi Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Benih Tanaman

Semusim dan Rempah; Sub Direktorat Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar; Sub Direktorat Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih; Sub Direktorat Kelembagaan Benih, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan adalah **terlaksananya pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) *Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pascapanen.
2) *Pengembangan Pengolahan Hasil Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pengolahan.
3) *Pembinaan usaha perkebunan*, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.
4) *Pembinaan penerapan standar dan sistem jaminan mutu keamanan pangan bagi pelaku usaha perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha.
5) *Pengembangan pemasaran hasil perkebunan*, yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Sub Direktorat Pemasaran Hasil.
6) *Fasilitasi Teknis Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pascapanen; Sub Direktorat Pengolahan; Sub Direktorat Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha; Sub Direktorat Pemasaran Hasil; Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

E. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah **Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) *Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) perkebunan*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah; dan Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar.
2) *Pemberdayaan perangkat perlindungan perkebunan*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT.
3) *Antisipasi dampak perubahan iklim*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.
4) *Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.
5) *SL-PHT tanaman perkebunan*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT.
6) *Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan*; yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT.

7) *Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran.
8) *Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Sub Direktorat Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT; Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah; Sub Direktorat Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar; Sub Direktorat Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran; Sub bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

F. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Sasaran kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah **Terlaksananya Pelayanan Teknis dan Administrasi Seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) *Jumlah Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Perlengkapan, Umum, serta Evaluasi dan Layanan Rekomendasi*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Bagian Umum.
2) *Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya*, yang menjadi tugas dan fungsi dari Bagian Perencanaan; Bagian Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; dan Bagian Umum.

G. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan Ambon

Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan Ambon adalah **terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah:

1) Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
2) Pembangunan kebun contoh, uji dempot dan uji koleksi tanaman perkebunan;
3) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan;
4) Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan;
5) Fasilitasi teknis dukungan pengawasan dan pengujian mutu benih dan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak adalah **terlaksananya penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan Tahun 2015-2019 adalah 1) rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan; dan 2) eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017

Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 merupakan bagian dari program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yaitu: "***Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan***".

2.2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017

Sasaran Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 adalah Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustry berkelanjutan. Dalam mengukur kinerja Ditjen Perkebunan ada 2 (dua) indikator yang dipergunakan yaitu: (1) Laju peningkatan produksi tanaman tebu sebesar 7,03%; (2) Laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya sebesar 2,90%.

Sedangkan sasaran kegiatan pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 ditetapkan sesuai dengan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 yang diterbitkan bulan Oktober 2016 adalah:

1) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tahunan dan penyegar adalah **terlaksananya pengembangan tanaman tahunan dan penyegar** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:
   a) Pengembangan tanaman tahunan seluas 32.911 ha
   b) Pengembangan tanaman kakao seluas 5.475 ha;
   c) Pengembangan tanaman penyegar lainnya seluas 10.725 ha;

d) Perluasan tanaman tahunan dan penyegar di lahan kering seluas 4.380 ha;

e) Fasilitasi teknis pengembangan tanaman tahunan dan penyegar selama 12 bulan.

2) Sasaran kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah **menurunkan luas areal yang terserang OPT dan terfasilitasinya pencegahan kebakaran lahan dan kebun, bencana alam serta dampak perubahan iklim** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan seluas 800 ha;

b) Penanganan dampak perubahan iklim sebanyak 26 KT;

c) Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan sebanyak 135 Desa;

d) SL-PHT Perkebunan sebanyak 8 KT;

e) Penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan 9 kasus;

f) Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 bulan.

3) Sasaran dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah **terlaksananya pelayanan teknis dan administrasi seluruh unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Pelayanan dan pembinaan manajemen dan teknis lainnya sebanyak 318 Dokumen;

b) Layanan dukungan manajemen Eselon I sebanyak 12 Layanan;

c) Layanan Inteernal (Overhead) sebanyak 1 Layanan;

d) Layanan Perkantoran selama 12 Bulan.

4) Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBPPTP) Medan, Surabaya dan Ambon adalah **terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah:

a) Pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan sebanyak 88,087.077 batang;
b) Pembangunan teknologi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 45 Paket;
c) Fasilitasi teknis dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan selama 12 Bulan.
d) Layanan dukungan manajemen Eselon I sebanyak 24 layanan;
e) Layanan internal sebanyak 70 layanan
f) Layanan perkantoran selama 12 bulan.

Sedangkan sasaran kegiatan dukungan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BPTP) Pontianak adalah terlaksananya penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan adalah:

a) Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan sebanyak 11 Paket Teknologi;
b) Eksplorasi Pemanfaatan Pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati tanaman perkebunan sebanyak 7 Jenis;
c) Pembinaan dan sertifikasi desa pertanian organil berbasis komoditas perkebunan sebanyak 6 desa;
d) Fasilitasi teknis penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan selama 12 bulan.

5) Sasaran peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah adalah **terlaksananya pengembangan tanaman semusim dan rempah** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Pengembangan tanaman semusim lainnya seluas 2.689 ha;
b) Pengembangan tanaman rempah seluas 23.454 ha;
c) Perluasan tanaman semusim dan rempah di lahan kering seluas 15.811 ha;
d) Pengembangan tanaman tebu seluas 3488 ha;
e) Fasilitasi teknis dukungan pengembangan tanaman semusim dan rempah selama 12 bulan.

6) Sasaran kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan adalah **meningkatnya penerapan pascapanen, pembinaan usaha dan pemasa** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:

a) Pengembangan pascapanen komoditas perkebunan sebanyak 219 KT;
b) Fasilitasi teknis dukungan pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan selama 12 bulan.
c) Pengembangan pengolahan hasil perkebunan sebanyak 82 Unit;
d) Pengembangan penerapan standardisasi, mutu dan pembinaan usaha perkebunan 13 kegiatan;
e) Pengembangan pemasaran hasil perkebunan sebanyak 19 kegiatan;

3) Sasaran Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan adalah **terlaksananya pengembangan tanaman tahunan** dengan fokus kegiatan pengembangan dan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah:
a) Penyediaan benih unggul tanaman perkebunan seluas 1.619 ha;
b) Fasilitasi teknis dukungan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan selama 12 bulan.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan dalam mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya alam yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya yang berupa hasil (*outcomes*) maupun keluaran (*output*).

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 disusun setelah DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan diterima pada bulan Januari 2017 dan telah mengikuti Pedoman Permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. PK Direktorat Jenderal Perkebunan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian pada bulan Januari 2017. PK tersebut berupa *outcomes* yang dimanifestasikan dalam dimensi produksi tanaman perkebunan.

Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran awal sebesar Rp. 496.175.559.000,-. Pada bulan Oktober 2017 memperoleh alokasi APBNP sebesar Rp. 652.356072.00,- sehingga pahu Tahun 2017 menjadi Rp. 1.148.531.631.000,-.

Anggaran tersebut diterima oleh 38 satker lingkup Ditjen Perkebunan terdiri 1 (satu) satker Pusat Ditjen Perkebunan, 4 Satker UPT Pusat Ditjen Perkebunan dan 33 Satker Provinsi yang menangani perkebunan seluruh Indonesia.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja serta target yang telah disusun dalam **Format Perjanjian Kinerja (PK)** Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017

Ganti tabel dengan tahun PK 2017

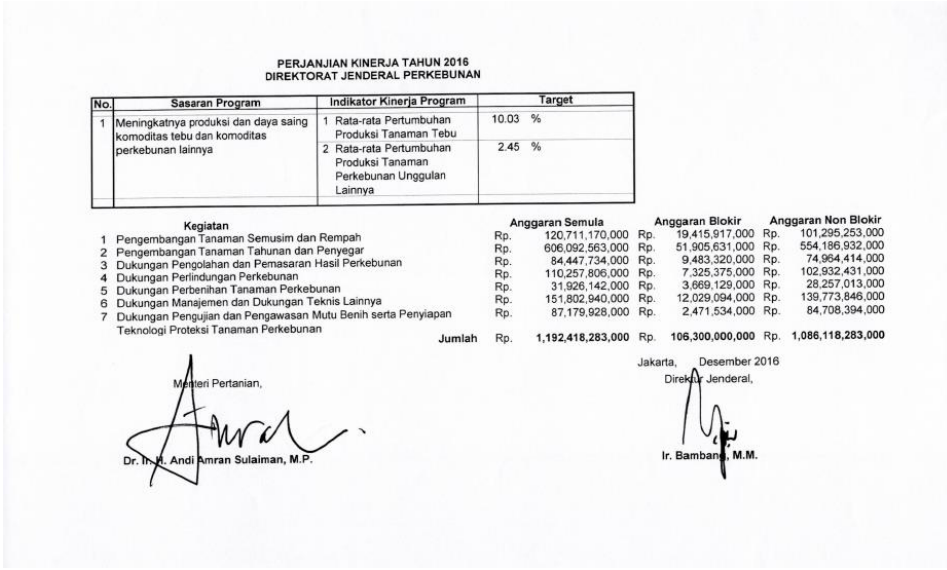

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
1	Meningkatnya produksi dan daya saing komoditas tebu dan komoditas perkebunan lainnya	1 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu	10.03 %
		2 Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya	2.45 %

Kegiatan	Anggaran Semula	Anggaran Blokir	Anggaran Non Blokir
1 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Rp. 120,711,170,000	Rp. 19,415,917,000	Rp. 101,295,253,000
2 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar	Rp. 606,092,563,000	Rp. 51,905,631,000	Rp. 554,186,932,000
3 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp. 84,447,734,000	Rp. 9,483,320,000	Rp. 74,964,414,000
4 Dukungan Perlindungan Perkebunan	Rp. 110,257,806,000	Rp. 7,325,375,000	Rp. 102,932,431,000
5 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Rp. 31,926,142,000	Rp. 3,669,129,000	Rp. 28,257,013,000
6 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp. 151,802,940,000	Rp. 12,029,094,000	Rp. 139,773,846,000
7 Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan	Rp. 87,179,928,000	Rp. 2,471,534,000	Rp. 84,708,394,000
Jumlah	**Rp. 1,192,418,283,000**	**Rp. 106,300,000,000**	**Rp. 1,086,118,283,000**

Menteri Pertanian,

Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Jakarta, Desember 2016
Direktur Jenderal,

Ir. Bambang, M.M.

Perjanjian kinerja Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian yaitu meningkatnya produksi dan daya saing komoditas tebu dan komoditas lainnya dengan indikator kinerja sebagai berikut:

1) Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu sebesar 7,03%,- dan

2) Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya sebesar 2,90%.

Sasaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2017 yang ditetapkan didukung oleh anggaran yang tertuang dalam

DIPA/POK dan selanjutnya menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan dengan Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2017, untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama dengan total anggaran sebesar Rp. 1.148.531.631,- dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 461.803.189.000,-
(2) Dukungan perlindungan perkebunan dengan alokasi anggaaran sebesar Rp. 37.792.262.000,-
(3) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dengan alokasi anggaran sebesar 136.782.903.000,-
(4) Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.330.473.000,-
(5) Pengembangan tanaman semusim dan Rempah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 265.056.628.000,-
(6) Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.469.331.000,-
(7) Dukungan perbenihan tanaman perkebunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.294.845.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban pimpinan atas nama organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organissasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang berlaku.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Setiap akhir Tahun Anggaran dan berakhirnya kegiatan, instansi harus melakukan Pengukuran Kinerja untuk mengetahui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sesuai yang diamanatkan dalam permen-PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Secara nasional ukuran Keberhasilan unit instansi Pemerintah bisa diukur dengan mengunakan kriteria keberhasilan Sub Sektor tertentu. Ditjen perkebunan dalam hal ini menggunakan indikator makro dan indikator mikro. Tingkat kinerja ini, tidak bisa di klaim sebagai keberhasilan secara substantif karena banyak pihak yang turut berperan dalam pencapaiannya. Namun demikian Ditjen Perkebunan memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian indikator tersebut

khususnya sub sektor perkebunan. Peran tersebut harus dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai fasilitator dan penggerak pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Sesuai tugas dan fungsinya, Kriteria ukuran keberhasilan Ditjen perkebunan ditentukan oleh pencapaian terhadap target indikator kinerja Program yang diukur terhadap Perjanjian Kinerja (PK), dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir dan dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra Ditjen Perkebunan. Pengukuran kinerja tersebut akan mengacu pada sasaran program (outcomes) sebagai berikut:

1. Indikator kinerja rata-rata pertumbuhan produksi tebu Tahun 2017 sebasar 7,03%.
2. Indikator kinerja rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya Tahun 2017 sebasar 2,90.

Pengukuran kinerja tersebut disertai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja; efesiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan.

Untuk mengukur efisiensi (E) di gunakan formula berdasarkan PMK 249 Tahun 2011, sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{RAK \text{ ke i}/RVK \text{ ke i}}{PAK \text{ ke i}/TVK \text{ ke i}}\right) \times 100\%}{n}$$

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Dari formula tersebut berarti suatu kegiatan di katakan efisien jika memiliki nilai efisiensi lebih besar sama dengan 50% dan jika lebih besar dari 100% dikatakan efisien tetapi perlu penjelasan lebih lanjut karena dianggap anomali.

Sasaran program (*Outcomes)* diwujudkan dalam bentuk produksi tanaman perkebunan. Hal tersebut sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan simpul kritis sebagai berikut: (1) Mengingat tanaman perkebunan pada umumnya bersifat tahunan sehingga produksi tanaman baru dapat dihitung minimal 4 (empat) tahun ke depan; (2) Sebagaimana diketahui bahwa biaya investasi pengembangan perkebunan yang dibiayai dengan APBN jumlahnya sangat kecil sekitar 2% per tahun. Apabila yang dihitung hanya kegiatan yang dibiayai dengan APBN, maka pengaruhnya terhadap produksi tingkat nasional sangat kecil sekali, padahal Direktorat Jenderal Perkebunan telah membina seluruh perkebunan yang ada di Indonesia, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar melalui pembinaan, pengawalan, dan pendampingan, serta kebijakan maupun dukungan manajemen dan adminsitrasi.

Pendekatan pertama, apabila tanaman yang ditanam pada tahun berjalan sesuai berlakunya APBN, maka tidak dapat dihitung produksinya pada tahun yang sama, dengan demikian apabila sesuai ketentuan yang berlaku maka produksinya (*outcomes)* adalah nol (tidak ada produksi). Pendekatan lainnya, jika yang dihitung produksi tahun

berjalan, maka yang dihitung merupakan produksi dari tanaman yang tahun tanamnya minimal 4 (empat) tahun yang lalu. Berkenaan dengan kedua pendekatan dimaksud, meskipun tidak sepenuhnya benar, Direktorat Jenderal Perkebunan menyepakati produksi dan produktivitas pada tahun berjalan ditetapkan sebagai *outcomes* dengan menggunakan target dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan perkebunan Tahun 2015-2019 sebagai acuannya.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Perkebunan dan Menteri Pertanian berupa *outcomes* yang dimanifestasikan dalam **produksi**. Dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2015 dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan bahwa Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu: (1) laju peningkatan produksi tanaman tebu; dan (2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya. Adapun proyeksi IKP Ditjen Perkebunan Tahun 2017 adalah **1) laju peningkatan produksi tanaman tebu yang ditargetkan sebesar 7,03 dan 2) laju peningkatan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya dengan target sebesar 2,90%.**

Dalam upaya terwujudnya laju peningkatan produksi tanaman tebu dan tanaman unggulan perkebunan lainnya tersebut, pada Tahun 2017 dilakukan melalui pengembangan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar dengan dukungan penanganan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penyediaan benih unggul

bermutu tanaman perkebunan, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya. Adapun indikator yang digunakan adalah meningkatnya produksi dan produktivitas 16 komoditas unggulan nasional perkebunan yang meliputi tebu, kapas, tembakau, nilam, karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, cengkeh, teh, pala, sagu dan kemiri sunan.

3.1.1. Pencapaian Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun Ini

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perkebuan pada Tahun 2017 jika dihitung berdasarkan target kinerja Tahun 2017 sesuai dengan perjanjian kinerja Direktur Jenderal Perkebunan dengan Menteri Pertanian seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dilihat Dari Rata-rata Pertumbuhan Produksi

Indikator Kinerja Program	Target PK	Realisasi 2017	Realisasi thd PK	Katagori Kinerja
Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (%)	7.03	(3.64)	90.03	Berhasil
Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya (%)	2.9	(0.73)	96.48	Berhasil

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018 (Diolah)

Tabel 4 menjelaskan bahwa target dan realisasi yang harus dicapai dalam pada Tahun 2017 sesuai dengan PK Direktur Jenderal Perkebunan Tahun 2017 yaitu:

1. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu dengan target sebesar 7,03% terealisasi sebesar (-3,64) atau terjadi penurunan produksi sebesar 3,64%. Dengan capaian ini berarti kinerja Ditjen

Perkebunan dalam mencapai produksi tanaman tebu mencapai 90,03% dari target PK, masuk dalam katagori berhasil.

2. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya dengan target sebesar 2,90% terealisasi sebesar (-0,73%) atau menurun sebesar 0,73%. Dengan capaian ini berarti kinerja Ditjen Perkebunan mencapai 96,43% dari target masuk dalam katagori berhasil.

Perhitungan capaian ini diperoleh dari analisis pencapaian target PK yang dikonversikan ke dalam produksi 17 komoditas strategis Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Program Komoditas Strategis Ditjen Perkebunan Tahun 2017

No	Komoditas	Produksi (Ton)			Target PK		Capaian Kinerja (%)
		2016	2017	%	Pertbhn (%)	Produksi (Ton)	
1	2	3	4		5	6	7
A	**Komoditas Tebu**			**96.36**	**7.03**		**90.03**
1	Tebu	2,204,619	2,124,307	96.36	7.03	2,359,603.72	90.03
B	Komoditas Perkebunan Unggulan Lainya			**99.27**	**2.90**		**96.43**
2	Kakao	658,399	659,776	100.21	4.93	690,858.07	95.50
3	Teh	138,935	139,362	100.31	0.48	139,601.89	99.83
4	Kelapa Sawit	31,730,961	37,812,627	119.17	5.87	33,593,568.41	112.56
5	Sagu	383,613	385,761	100.56	2.90	394,737.78	97.73
6	Pala	83,305	84,385	103.24	4.74	84,883.66	98.57
7	Tembakau	26,728	52,452	120.30	6.89	35,459.56	112.54
8	Lada	86,334	87,029	100.81	1.15	87,326.84	99.66
9	Karet	3,357,952	3,629,180	108.08	3.52	3,476,151.91	104.40
10	Kopi	663,871	668,683	100.72	1.81	675,887.07	98.93
11	Cengkeh	39,611	23,773	58.66	1.85	42,193.80	87.05
12	Kemiri Sunan	6	6	100.00	1.19	6.07	98.82
13	Kelapa	2,904,170	2,870,739	98.85	1.36	2,943,666.71	97.52
14	Nilam	2,192	2,115	96.49	0.72	2,207.78	95.80
15	Jambu Mete	137,094	131,685	96.05	2.39	140,370.55	93.81
16	Kapas	932	519	55.69	3.63	965.83	53.74

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 4 dan 5 dapat dijelaslan sebagai berikut:

A. Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu (GKP)

Dibanding dengan target Tahun 2017, rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu dengan target sebesar 7,03% (setara dengan 2.359.604 ton) terealisasi sebesar 2.124.307 ton atau hanya mencapai 90,03%.

Tidak tercapainya target produksi tebu (gula) tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan/hambatan/kendala yang dihadapai dilapangan.

(Sub Bab tersendiri)

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan (tebu dan komoditas lain)

3.1.4.1. Keberhasilan : -

3.1.4.2 Kegagalan : Akar permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu dikelompokkan ke dalam 11 (sebelas) domain permasalahan, yaitu perubahan iklim atau anomali ilkim, Inovasi teknologi budidaya terbarukan belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adatif di lahan kering, dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas Harga petani, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, Minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu.

1. Perubahan iklim atau anomali ilkim, menyebabkan petani tidak memiliki pola tanam yang tetap berakibat pada masa tanam, pemeliharaan dan panen tidak sesuai standar teknis, pertumbuhan tebu stagnan dan kering. Hal ini terjadi karena usaha tani tebu mayoritas (90%) di lahan kering sulit pengairan sehingga waktu

tanam, pemeliharaan dan panen tidak sesuai dengan pola tanam yang direkomendasikan.

2. Inovasi teknologi budidaya tebu terbarukan belum optimal, menyebabkan sebagian besar petani masih menggunakan teknologi yang belum tepat guna (rendemen dan produktivitas masih rendah), akibatnya penerapan inovasi teknologi budidaya tebu belum optimal, pengelolaan lahan tebu sempit dan terpencar, dan modernisasi melalui mekanisasi pertanian belum diterapkan secara optimal.

3. Terbatasnya varietas unggul baru yang adaptif di lahan kering, menyebabkan produktivitas tebu dan rendemen rendah. Akibatnya petani menanam tebu dengan varietas asalan atau varietas unggul yang tidak sesuai spesifikasi lokasi.

4. Dukungan Pengolahan belum Optimal, menyebabkan sistem pasar belum berjalan dengan baik, kehilangan produksi karena rendahnya efisiensi industri pengolahan, persaingan industri kurang sehat dan lain-lain. Hal ini disebabkan kondisi PG di Indonesia rata-rata sudah berumur tua, dengan kapasitas giling kecil di bawah 3.000 TCD, sehingga berdampak pada kinerja PG untuk menghasilkan rendemen gula tidak optimal.

5. Petani meragukan transparansi rendemen, menyebabkan minat petani untuk meningkatkan rendemen lebih kecil dan lebih besar kemungkinan berminat meningkatkan berat tebu, hal ini berakibat

pada sistem budidaya yang kurang spesifik meningkatkan produktivitas.

6. Dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, antara lain kebijakan alih fungsi lahan tebu ke lahan marginal/lahan kering, tanpa dukungan kebijakan lanjutan khusus tebu, kebijakan harga masih belum menguntungkan petani, stakeholders gula tebu sangat heterogen.

7. Distabilitas Harga petani disebabkan sistem pasar gula misalnya dengan beredarnya gula kristal putih impor, distorsi gula rafinasi di pasaran, harga Patokan Petani (HPP) yang ditentukan oleh Kementerian Perdagangan masih di bawah Biaya Pokok Produksi (BPP) yang ditentukan Kementerian Pertanian. Hal ini menyebabkan kurang menariknya pengembangan tebu, sehingga existing tanaman tebu tidak bertambah bahkan sebaliknya. Jika hal ini dibiarkan maka luasan areal tebu akan semakin berkurang.

8. Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, menyebabkan sulitnya memperoleh tenaga kerja baik petani/pengusaha tebu, penyuluh/pembina pertebuan dan SDM lainnya yang menangani langsung gula berbasis tebu di Indonesia hal ini tercermin dari pengelolaan pertanian di daerah dilakukan secara desentralisasi, banyak petugas teknis pertanian yang ditugaskan tidak sesuai dengan bidang teknis keahliannya dan kurangnya jumlah petugas penyuluh tanaman tebu, sehingga menyebabkan budidaya tebu tidak sesuai standar teknis.

9. Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, karena tebu sangat cocok di daerah berpengairan yang cukup maka alam yang sesuai adalah iklim yang stabil, daerah cukup air dan atau daerah berpengairan modern. Hal ini sulit di temukan jika dilakukan oleh petani secara spot-spot dan harus di lahan hamparan yang sudah sulit ditemukan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh persaingan komoditas, ketersediaan lahan dan minat petani/pengusaha itu sendiri.

10. Minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu, menyebabkan pengembangan tebu tidak konsisten. Hal ini tercermin dari banyaknya rencana pengembangan industri gula berbasis tebu oleh investor yang mengalami kesulitan bahkan mengakhiri niatnya tanpa hasil, padahal kunci pengembangan tebu adalah tersedianya pabrik Gula (PG). Hal ini disebabkan investasi di industri gula berbasis tebu relatif besar sementara dukungan regulasi, sarana infrastruktur dan sosial ekonomi kemasyarakatan masih sangat kurang.

11. Manajemen pengelolaan pengembangan tebu dan faktor pendukungnya baik hulu dan hilir belum sinergi dan belum maksimal. Hal ini disebabkan komitmen terhadap pembangunan pertebuan belum ada persepsi yang sama dari semua stakehorders.

Permasalahan tersebut di atas sangat berpengaruh besar terhadap eksistabilitas pergulaan nasional. Oleh karena itu, solusi dan

rekomendasinya adalah terselesaikannya permasalahan yang sangat komplek tersebut.

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Rekomendasi Solusi Akar Permasalahan Produksi Gula Tebu

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Pengembangan Tebu 90% di lahan Kering/marginal	1. Penyediaan sumur dalam, embung, sumur dangkal, permukaan
2	Sistem Budidaya belum Optimal	2. Meningkatkan pembinaan, pendampingan dan penyuluhan 3. Rehabilitasi Tanaman melalui bongkar ratoon dan rawat ratoon 4. Adopsi inovasi terbarukan dari studi banding, penelitian dan percontohan atau demplot.
3	Sulitnya memperoleh benih unggul tepat waktu (sesuai pola tanam)	5. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga penelitian dan sumber benih 6. Pembangunan benih unggul secara berjenjang dan terencana
4	Rendemen tidak Optimal	7. Revitalisasi PG 8. Penataan varietas 9. Sistem budidaya sesuai rekomendasi teknis 10. Memperbaiki manajemen tebang muat angkut
5	Transparansi rendemen	11. Fasilitasi pengawas rendemen 12. Membentuk Tim Transparansi Rendemen 13. Pengawalan rendemen melibatkan petani, dinas terkait, Perguruan tinggi dan PG 14. Pengukuran rendemen individu menggunakan *Core Sampler*
6	Sulit melakukan perluasan areal tebu	15. Meningkatkan Koordinasi dengan K/L terkait dengan pembebasan lahan 16. Meningkatkan animo masyarakat untuk mengembangkan tanaman tebu 17. Perluasan di lahan pengembangan
7	Lahan sempit dan terpencar	18. Melakukan regrouping lahan minimal 10 ha, bekerja sama dengan pemda dan BPN
8	Harga Gula belum menguntungkan petani	19. Menekan biaya produksi dengan full mekanisasi, regrouping lahan, manajemen tebang muat angkut, subsidi pupuk, insentif produksi gula tebu dan profesionalitas petani tebu 20. Membentuk Tim pengawasan pasar gula 21. Penguatan lembaga pemasaran bentukkan petani/klp tani tebu
9	Minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan	22. Melatih tenaga kerja pertebuan 23. Meningkatan kapabilitas SDM petugas teknis dan penyuluh

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
		dan petani tebu melalui pelatihan/traning 24. Profesionalisasi kelembagaan petani melalui pelatihan dan training 25. Asosiasi tebu Indonesia di optimalkan
10	Terbatasnya SDA	26. Optimalisasi lahan 27. Optimalisasi penggunaan sumber daya air 28. Memanfaatkan iklim sebagai sumberdaya yang efisien 29. Menggunakan sarana dan prasarana yang mendukung
11	Dukungan lembaga riset pengembangan tebu kurang	30. Pemberdayaan lembaga riset tebu yang sudah ada secara optimal
12	Minimnya investasi	31. Sosialisasi dan koordinasi dengan investor 32. Meningkatkan koordinasi sinergi dengan pihak-pihak terkait 33. Memfasilitasi investor baik secara administrasi maupun insfrastruktur
13	Menyatukan persepsi yang sama terhadap kemajuan pembangunan pergulaan Nasional	34. Sosialisasi kepada seluruh stakeholders pergulaan dalam menyatukan persepsi. 35. Meningkatkan kebersamaam lembaga/instansi/organisasi terkait 36. Meningkatkan pemberdayaan petani/kelompoktani/koperasi/asosiasi pertebuan Indonesia

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017 (Diolah)

Secara keseluruhan terdapat 13 akar masalah yang perlu diselesaikan secara sinergisitas baik lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait. Hal ini disebabkan produksi gula tebu sangat terkait dengan stakeholders pergulaan secara luas. Masing-masing akar permasalahan telah dirumuskan rekomendasi solusi yang sesuai dan relevan dengan konteks akar masalah yang dihadapi, dimana dihasilkan 36 rekomendasi solusi tindak lanjut upaya perbaikan kinerja ke depan.

Dalam upaya pencapaian target kinerja, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan kegiatan pembinaan, koordinasi dan pengembangan tanaman tebu yang tersentral di 9 provinsi yaitu Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah,Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.

Sedangkan rencana pengembangan ada di provinsi Aceh, Jambi, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Pada Tahun 2017, untuk mendukung kinerja pencapaian target PK Ditjen Perkebunan dilakukan kegiatan utama peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusin dan rempah melalui kegiatan pengembangan tebu seperti pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan Dukungan Pencapaian Target Peningkatan Produksi Gula APBN Ditjen Perkebunan Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFISIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	Pengembangan Tebu	110,697,450			98,594,153	89.07				79.97	11 Prov 11 Kab
a	Rawat Ratoon	7,631,250	2,250	Ha	5,881,077	77.07	2,150	Ha	95.56	98.37	6 Prov. 24 Kab.
b	Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP)	18,708,387	556	Org	16,718,478	89.36	556	Org	100.00	76.59	15 Provinsi
c	Mepping ketersediaan air	2,243,105	5	Pkt	2,050,734	91.42	5	Pkt	100.00	71.44	4 Provinsi
d	Pengawalan dan pendampingan tebu dan pengadaan sarana	1,425,460	10	Keg	1,319,071	92.54	10	Keg	100.00	68.66	2 Prov. 9 kab
e	Penerapan varietas tebu adaptif di wilayah pengembangan	1,375,000	4	Pkt	1,120,361	81.48	4	Pkt	100.00	96.30	4 Provinsi
f	Pengawalan varietas tebu adaptif	226,900	1	Pkt	186,978	82.41	1	Keg	100.00	93.99	1 Provinsi
g	Bimbingan teknis petani dan alsintan	438,350	2	Keg	416,297	94.97	2	Keg	100.00	62.58	1 Provinsi
h	Bantuan Peralatan	78,648,998	275	Unit	70,901,157	90.15	260	Unit	94.55	71.87	15 Provinsi
	Pompa Air	5,720,000	191	Unit	4,894,689	85.57	176	Unit	92.15	67.84	13 Provinsi
	Traktor Roda 4	31,902,118	43	Unit	28,701,840	89.97	43	Unit	100.00	75.08	14 Prov 42 kab
	Grab Loader	41,026,880	41	Unit	37,304,628	90.93	41	Unit	100.00	72.68	4 Provinsi
2	Dukungan Perbenihan Perkebunan	33,745,007			1,299,828	3.85				51.97	2 Provinsi
a	Pembangunan KBD tebu	33,745,007	867	Ha	4,324,831	12.82	112	Ha	12.92	51.97	2 Provinsi
3	Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	3,382,000			2,547,007	75.31				111.72	3 Prov 6 Kab
a	Fasilitasi pengolahan gula tebu	3,382,000	8	Unit	2,547,007	75.31	8	Unit	100.00	111.72	3 Prov 6 Kab
	TOTAL/RATA-RATA	147,824,457			102,440,988	69.30				81.22	14 Prov 42 kab

Sumber: Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, diolah 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan tebu Tahun 2017 di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi per kegiatan diperoleh nilai efisiensi sebesar 89,07% (Efisien), dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengembangan tebu dilaksanakan secara efisien dengan nilai efisiensi sebesar 79,97% dengan rincian sebagai berikut:
   - Rawat ratoon seluas 2.150 ha (95,56%) dengan penyerapan anggaran sebesar 77,07% dari pagu anggaran, dengan nilai efisiensi sebesar 98,37% (efisien). Namum demikian selisih ambang batas efisien sangat kecil yaitu 1,63%, ini berarti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan nilai kontrak memiliki selisih yang relativ besar.
   - Operasional TKP dan PL-TKP sebanyak 556 Orang (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 89,36% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 76,59% (efisien).

- Wepping ketersediaan air sebanyak 5 paket (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 91,42% dari pagu anggaran. dengan nilai efisiensi sebesar 71,44% (efisien).
- Pengawalan dan pendampingan tebu dan pengadaan saran sebesar 10 kegiatan (100%), dengan penyerapan sebesar 92,54% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 68,66% (efisien).
- Penerapan varietas tebu adaptif di wilayah pengembangan sebesar 4 paket (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 81,48% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 98,30 (efisien).
- Pengawalan varietas tebu adaptif di wilayah pengembangan sebesar 1 paket (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 82,41% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 93,99 (efisien).
- Bimbingan teknis petani dan alsintan sebesar 2 Keg (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 94,97% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 62,58 (efisien).
- Bantuan Peralatan sebesar 260 unit (94,55%) dengan penyerapan anggaran sebesar 90,15% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 71,87 (efisien).

2. Dukungan perbenihan yaitu pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) seluas 107 ha (12,86%) dengan penyerapan anggaran sebesar 12,82% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 50,86% (efisien). Namun demikian capaiannya sangat rendah karena faktor

keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kontrak kegiatan karena APBNP baru diterima POKnya pada bulan Oktober 2017.

3. Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yaitu kegiatan fasilitasi pengolahan gula tebu dengan realisasi sebesar 8 unit (100%) dengan penyerapan anggaran sebesar 75,31% dari pagu anggaran dengan nilai efisiensi sebesar 111,72% (efisien). Walaupun efisien namun terjadi anomaly karena selisih HPS dengan nilai kontrak relativ besar.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan tebu tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Keragunan dalam pelaksanaan kontrak karena waktu yang sangat terbatas (APBN-P besarnya sangat signifikan yang harus dilaksanakan dalam waktu kurang dari tiga bulan sehingga hanya beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan).
2. Perubahan pola tanam menyesuaikan anomali iklim, menyebabkan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara hati-hati karena di khawatirkan gagal tanam.
3. CP/CL yang telah dipersiapkan telah menggunakan lahannya untuk kegiatan tanaman semusim lainnya disebabkan petani membutuhkan pekerjaan dan pendapatan dari lahan pertanian yang diwilikinya.
4. Pengadaan alat pertanian melalui e-katalog kekurangan stok di tingkat produsen.
5. Ketersedian benih tidak sesuai dengan spesifikasi kegiatan misalnya umur benih yang masih kurang atau lewat umur.

6. Pihak ketiga mengajukan MOU penyediaan benih yang sama dengan pihak ketiga lainnya sehingga disaat pelaksanaan kekurangan benih siap salur.
7. Keterbatasan pihak ketiga yang memiliki keahlian teknis sesuai spesifikasi yang di minta.
8. Beberapa Regulasi yang menjadi penghambat perncepatan pelaksanaan kegiatan khuusnya dalam kegiatan perbenihan perkebunan atau kegiatan yang membutuhkan benih dalam spesifikasinya

B. Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya

Beberapa komoditas unggulan perkebunan lainnya yaitu Nilam, tembakau, kapas, kakao, kopi cengkeh, teh, karet, kelapa sawit, kelapa, pala, lada, jambu mete, sagu dan kemiri sunan.

Dibanding dengan target Tahun 2017, rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya dengan target rata-rata sebesar 2,90%, terealisasi menurun rata-rata (-0,73%) atau hanya mencapai 96,43% dibanding target masuk dalak katagori berhasil.

Tidak tercapainya target rata-rata partumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan/hambatan/kendala yang terjadi dilapangan. Beberapa Permasalahan yang dihadapi komoditas perkebunan unggulan lainnya yaitu:

a. Anomali iklim sebagai permasalahan umum terhadap tumbuh kembangnya tanaman perkebunaan unggulan dan khususnya sulitnya tanaman untuk menyesuaikan dengan perubahan alam.
b. Dukungan teknologi belum optimal khususnya komoditas yang dikembangkan di daerah tertentu.
c. Harga kurang stabil misalnya karena tidak adanya jaminan pemasaran, sistem pemasaran yang rumit dan lain-lain.
d. Minimnya dukungan Industri hilir misalnya tidak ada pabrik pengolahan, industri peningkatan nilai tambah belum optimal.
e. Minimnya dukungan industri hulu misalnya pupuk relatif mahal, ketersediaan mekanisasi kurang mendukung pengembangan komoditas strategis;

Berdasarkan analisis akar permasalahan yang telah dilakukan terkait permasalahan tidak tercapainya target pertumbuhan komoditas perkebunan unggulan lainnya, maka rekomendasi solusi perbaikan kinerja yang diberikan berdasarkan akar permasalahan tersebut secara ringkas disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekomendasi Akar Permasalahan Komoitas Perkebunan Unggulan Lainnya

No	Akar masalah	Rekomendasi solusi
1	Menurunnya produktivitas	1. Penerapan teknologi budidaya (Intensifikasi, Rehabilitasi dan pemanenan) 2. Perbaikan pasca panen 3. Menanam benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim 4. Intensifitas penanganan OPT
2	Harga yang tidak stabil	1. Menciptakan kepastian pasar 2. Perbaikan sistem pemasaran 3. Menciptakan peluang dengan menfasilitasi industri pengolahan di Indonesia 4. Membatasi impor produk turunan 5. Memperkuat kelmbagaan petani untuk pemasaran 6. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengturan sistem pemasaran 7. Memanfaatkan peluang ekspor dengan penguatan kelembagaan petani
3	Industri pengolahan masih kurang	1. Melatih petani untuk meningkatkan nilai tambah melalui pasca panen dan pengolahan produk the
4	SDM masih lemah	1. Pembinaan dan Pelatihan petugas lapangan 2. Pembinaan dan Pelatihan petani 3. Koordinasi dan konsultasi terkait pengembangan teh dengan perusahaan
5	Lemahnya inovasi teknologi	1. Pembinaan dan pelatihan terhadap tenaga teknis dilapangan dan petani untuk memperbaiki pola budidaya, pasca panen dan pemasaran 2. Penyediaan benih unggul yang adaptif
6	Minimnya industri pengolahan produk kakao	1. Pembinaan, pelatihan, Studi banding kepada kelompok tani 2. Mengundang investor untuk pengolahan produk kakao di Indonesia
7	Lemahnya Modal Petani	1. Pembinaan, pengawalan suvervisi dan sosialisasi pemanfaatan bantuan pemerintah 2. Memanfaakan fasilitas kredit yang di sediakan oleh perbankan dan lembaga lain 3. Mendorong perbankan dan lembaga keuangan lain untuk memberikan fasilias kredit kepada petani

Sumber: Ditjen Perkebunan, 2016

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dalam upaya mendukung pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya dilakukan kegiatan Pengembangan Tanaman unggulan perkebunan lainnya melalui alokasi APBN Tahun 2017, Kegiatan Ditjen Perkebunan yang mendukung upaya meningkatkan produksi tanaman unggulan perkebunan lainnya tersebut sebagaimana dijelaskan pada kegiatan pendukung pengembangan komoditas perkebunan berikut ini.

1. Kakao

Pada Tahun 2017, produksi kakao mengalami kenaikan sebesar 0,21% atau 659.776 ton dari 658.399 ton. Jika dibandingkan target dalam kinerja yaitu 4,93% (setara dengan 690.858 ton) mencapai 95,50% masuk dalam kategori berhasil. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kakao yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, serangan hama dan penyakit daun dan buah, harga kakao yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Dalam mendukung upaya peningkatan produksi kakao, Kermenterian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan mengalokasikan kegiatan yang mendukung pengembangan kakao di 11 provinsi dan 77 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia. Kegiatan yang dilakukan antara lain peremajaan kakao seluas 5.475 ha di 9 provinsi dan 29 kabupaten, perluasan kakao seluas 900 ha di 2 provinsi dan 4 Kabupaten, Pembangunan kebun induk dan entres seluas 4 ha dan 21 kabupaten dan kegiatan dukungan lainnya dengan menggunakan angaran sebesar 93,211 milyar.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao tersebut seperti pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan Pengembangan Kakao Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Kakao**	**90,696,190**			**71,296,020**	**78.61**				**67.22**	**9 Prov. 29 Kab.**
a	**Peremajaan Tanaman Kakao**	**62,831,485**	**5,475**	**Ha**	**45,304,929**	**72.11**	**4,243**	**Ha**	**77.50**	67.39	**9 Prov. 29 Kab.**
b	**Perluasan Tanaman Kakao**	**8,559,414**	**900**	**Ha**	**7,269,657**	**84.93**	**900**	**Ha**	**100.00**	87.67	**2 Prov. 4 Kab**
c	Pengembangan desa kakao	50,000	1	Keg	49,999	100.00	1	Keg	100.00	50.01	1 Prov. 1 Kab
d	TKP dan PL-TKP	10,084,490	500	Org	9,936,390	98.53	500	Org	100.00	53.67	23 Provinsi
e	Pengembangan desa kakao	787,514	1	Keg	785,174	99.70	1	Keg	100.00	50.74	1 Prov. 2 Kab
f	Operasional Substantion	2,359,000	4	Keg	2,336,544	99.05	4	Keg	100.00	52.38	4 Provinsi
g	Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani perkebunan	700,000	3	Keg	641,701	91.67	3	Keg	100.00	70.82	3 Provinsi
h	Operasional Substantion	2,359,000	4	Keg	2,336,544	99.05	4	Keg	100.00	52.38	4 Provinsi
i	Pengawalan dan pendampingan peremajaaan kakao	2,205,472	38	Keg	1,922,199	87.16	38	Keg	100.00	82.11	9 Prov. 38 Kab
j	Pelatihan penguatan kelembagaan petani kakao	399,555	90	Org	388,447	97.22	90	Org	100.00	56.95	2 Prov. 3 Kab
k	Pengawalan dan pendampingan perluasan	360,260	6	Keg	324,436	90.06	6	Keg	100.00	74.86	2 Prov. 5 Kab
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**5,092,086**			**1,299,828**	**25.53**				**62.00**	**11 Prov 11 Kab**
a	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (entees kako)	468,287	21	Ha	421,189	89.94	21	Ha	100.00	75.14	6 Prov 10 Kab
b	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI kakao)	107,572	4	Ha	103,057	95.80	4	Ha	100.00	60.49	11 Prov 11 Kab
c	Penyediaan benih siap tanam	3,853,196	1,482,000	Btg	3,231,993	83.88	1,267,110	Btg	85.50	54.74	3 Prov
e	Pengawalan dan Pembinaan	663,031	4	Keg	543,344	81.95	4	Keg	100.00	95.13	3 Prov
3	**Dukungan Perlindungan**	**218,060**			**218,060**	**100.00**				**50.00**	**1 Prov**
a	SLPHT Perkebunan	218,060	2	KT	218,060	100.00	2	KT	100.00	50.00	1 Prov
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**2,937,000**			**2,807,249**	**95.58**				**61.04**	**3 Prov 3 Kab**
a	Paspa panen	937,600	3	KT	896,114	95.58	3	KT	100.00	61.06	3 Prov 3 Kab
b	Pengolahan	1,999,400	2	Unit	1,911,135	95.59	2	Unit	100.00	61.04	2 Prov 2 Kab
	TOTAL	**98,943,336**			**75,621,157**	**76.43**				**66.73**	**11 Prov 29 kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Rempah Ditjen Perkebunan, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi (50%-100%) bahwa kegiatan pengembangan kakao mencapai nilai efisiensi sebesar 66,73% (efisien). Semua kegiatan telah efisien dilaksanakan dengan nilai efisiensi berkisar antara 50% sampai dengan 87,67%.

Teh

Pada Tahun 2017, produksi teh mengalami kenaikan sebesar 0,31% atau 139.362 ton dari 138.935 ton. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 0,48% (setara dengan 139.601 ton)

mencapai 99,83% masuk dalam katagori berhasil. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan teh yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, serangan hama dan penyakit daun dan akar, harga teh yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Kegiatan Pengembangan teh dilaksanakan di 1 provinsi dan 2 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu intensifikasi teh seluas 200 ha, rehabilitasi tanaman teh seluas 650 ha dan kegiatan dukungan lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman teh pada Tahun 2017 tersebut seperti pada Tabel 10.

Tabel 10. Kegiatan Pengembangan Tanaman Teh Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	Pengembagan Tanaman The	12,789,214			10,451,317	81.72				99.81	1 Prov. 2 Kab.
a	Rehabilitasi Tanaman Teh	4,229,800	200	Ha	3,181,660	75.22	200	Ha	100.00	111.95	1 Prov. 2 Kab.
b	Pengawalan dan pendam[ingan rehabilitasi tanaman teh	8,559,414	3	Keg	7,269,657	84.93	3	Keg	100.00	87.67	1 Prov. 2 Kab.
	TOTAL	12,789,214			10,451,317	81.72				99.81	1 Prov 2 kab

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi (50%-100%), nilai efesiensi kegiatan pengembangan teh adalah 99,81% (efisien). Terjadi anomali pada kegiatan rehabilitasi tanaman teh dengan nilai efisiensi sebesar 111,95% disebabkan realisasi anggaran sangat rendah (75,22%) sedangkan realisasi fisik 100% dikarenakan adanya selisih HPS dan nilai nilai kontrak relative besar.

2. Kelapa Sawit

Pada Tahun 2017, produksi kelapa sawit mengalami kenaikan sebesar 19,17% atau 37.812.627 ton dari 31.730.961 ton. Jika dibandingkan target dalam PK yaitu meningkat 5,87% (setara dengan 33.593.568 ton) mencapai 112,56% masuk dalam katagori **sangat berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kelapa sawit yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga TBS yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Kegiatan Pengembangan kelapa sawit yang didukung langsung oleh anggaran Ditjen Perkebunan dilaksanakan di 2 provinsi dan 4 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu perluasan tanaman kelapa sawit seluas 500 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kelapa sawit tersebut seperti pada tabel 11.

Tabel 11. Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	FISIK SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	FISIK SAT	FISIK %		
1	**Pengembagan Tanaman Kelapa Sawit**	**4,734,300**			**4,608,927**	**97.35**				**56.62**	**3 Prov. 4 Kab.**
a	Perluasan tanaman kelapa sawit	3,959,350	500	Ha	3,867,219	97.67	500	Ha	100.00	55.82	3 Prov. 4 Kab.
b	Fasilitasi pembentukan Lembaga ekonomi Masyarakat (LEM)	423,100	1	Keg	396,694	93.76	1	Keg	100.00	65.60	1 Prov. 1 Kab
c	Pelatihan penumbuhan kebersamaan peyani kelapa sawit	118,575	200	Org	112,296	94.70	200	Org	100.00	63.24	1 Prov. 1 Kab
d	penguatan kelembagaan petani kelapa sawit	233,275	20	Org	232,718	99.76	20	Org	20.00	50.60	1 Prov. 1 Kab
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**2,359,400**			**2,257,775**	**95.69**				**60.77**	**12 Provinsi**
a	Fasilitasi penetapan harga TBS	360,000	12	Keg	346,640	96.29	12	Keg	100.00	59.28	12 Provinsi
b	Koordinasi dan supervisi GNPSDA sub Sektor Perkebunan (K Sawit)	1,999,400	2	Unit	1,911,135	95.59	2	Unit	100.00	61.04	9 Provinsi
	TOTAL	**7,093,700**			**6,866,702**	**96.80**				**58.00**	**15 Provinsi**

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan di atas, dapat dijelaskan nilai efisiensi (50%-100%), nilai efisiensi kegiatan pengembangan kelapa sawit adalah

58,00% (efisien). Nilai efesiesi perkegiatan berkisar antara 56,62 sampai dengan 60,77%.

3. Sagu

Pada Tahun 2017, produksi sagu mengalami kenaikan sebesar 0,56% atau 385.761 ton dari 383.613 ton. Jika dibandingkan target dalam PK yaitu 2,90% (setara dengan 394.737 ton) mencapai 97,73% masuk dalam katagori berhasil. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sagu yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, tanaman kurang perawatan karena SDM yang belum memadai, harga sagu yang relatif kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Pada Tahun 2017 Kegiatan Pengembangan tanaman sagu tidak dialokasikan pada tahun 2017 karena keterbatasan alokasi anggaran Ditjen Perkebunan.

4. Karet

Pada Tahun 2017, produksi karet mengalami kenaikan sebesar 8,08% atau 3.629.180 ton dari 3.357.952 ton. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 3,52% (setara dengan 3.476.151 ton) mencapai 104,40% masuk dalam katagore **sangat berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan karet yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga karet yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Kegiatan Pengembangan tanaman karet dilaksanakan di 10 provinsi dan 18 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu

peremajaan tanaman karet seluas 3.469 ha, perluasan tanaman karet seluas 450 ha, pembangunan sumber benih karet seluas 21 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karet tersebut seperti pada Tabel 13.

Tabel 13. Kegiatan Pengembangan Karet Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENS (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Karet**	**129,538,495**			**91,458,670**	**70.60**				**83.21**	**13 Prov 55 Kab**
a	Peremajaan Tanaman Karet	123,872,937	14,650	Ha	87,065,294	70.29	12,077	Ha	82.44	86.85	13 Prov 45 Kab
b	Perluasan Tanaman Karet	802,000	100	Ha	464,625	57.93	100	Ha	100.00	155.17	1 Prov. 1 Kab
c	Pengawalan dan pendamingan peremajaan karet	3,935,483	57	Keg	3,201,891	81.36	57	Keg	100.00	96.60	10 Prov. 55 Kab
d	Pengawalan dan pendamingan perlua karet	237,960	2	Keg	155,410	65.31	2	Keg	100.00	136.73	23 Provinsi
e	Fasilitasi pembentukan LEM petani karet	449,655	1	Keg	351,652	78.20	1	Keg	100.00	104.49	1 Prov. 1 Kab
f	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet	240,460	200	Org	219,798	91.41	200	Org	100.00	71.48	4 Provinsi
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**3,820,660**			**2,604,323**	**68.16**				**47.92**	**11 Prov 11 Kab**
a	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (entres karet)	753,253	5	Ha	710,039	94.26	5	Ha	100.00	64.34	5 Prov 3 Kab
b	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (entres karet)	174,604	2	Keg	102,834	58.90	2	Keg	100.00	152.76	8 Prov 3 Kab
c	Penyediaan benih siap tanam	2,229,772	1,400,000	Btg	1,248,106	55.97	700,000	Btg	50.00	20.13	2 Prov
e	Pengawalan dan Pembinaan benih karet	663,031	4	Keg	543,344	81.95	4	Keg	100.00	95.13	2 Prov
3	**Dukungan Perlindungan Perlkebunan**	**627,213**			**627,213**	**100.00**				**50.00**	**1 Prov**
a	Denfarm penerapan PHT tanaman karet	627,213	175	Ha	627,213	100.00	175	Ha	100.00	50.00	4 Prov 4 Kab
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**13,136,450**			**11,967,204**	**91.10**				**72.25**	**3 Prov 3 Kab**
a	Pasca panen karet	7,498,450	96	KT	6,853,314	91.40	96	KT	100.00	71.51	11 Prov 35 Kab
b	Fasilitasi pengolahan karet	5,638,000	21	Unit	5,113,890	90.70	21	KT	100.00	73.24	9 Prov 9 Kab
	TOTAL	**147,122,818**			**106,657,410**	**72.50**				**81.17**	**11 Prov 35 kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan karet, dapat dijelaskan bahwa nilai efesiensi kegiatan pengembangan karet adalah sebesar 81,17% (efisien). Kegiatan utama yang kurang efisien yaitu dukungan perbenihan disebabkan kegiatan penyediaan benih kurang efisien (20,13%) hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang tidak terlaksana selain itu juga disebabkan capaian serapan anggaran lebih tinggi dari pada realisasi fisik kegiatan.

5. Kelapa

Pada Tahun 2017, produksi karet mengalami penurunan sebesar (-1,15%) atau 2.870.739 ton dari 2.904.170 ton pada tahun 2016.

Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 1,36% (setara dengan 2.943.667 ton) mencapai 97,52% masuk dalam katagori **berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan karet yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga kelapa yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Kegiatan Pengembangan tanaman kelapa dilaksanakan di 21 provinsi dan 57 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu peremajaan tanaman kelapa seluas 14.148 ha, perluasan tanaman kelapa seluas 700 ha, pembangunan dan pemeliharaan kebun benih kelapa seluas 158 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan karet tersebut seperti pada Tabel 14.

Tabel 14. Kegiatan Pengembangan Kelapa Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI				NILAI EFESIENSI (	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Kelapa**	**45,973,715**			**36,180,291**	**78.70**				**67.84**	**21 Prov 57 Kab**
a	Peremajaan Tanaman Kelapa	39,952,595	16,611	Ha	31,693,083	79.33	14,148	Ha	85.17	67.16	21 Prov 57 Kab
b	Perluasan Tanaman Kelapa	3,201,700	1,100	Ha	1,902,908	59.43	700	Ha	63.64	66.51	3 Prov. 9 Kab
c	pengawalan dan pendampingan peremajaan kelapa	1,746,770	30	Keg	1,591,322	91.10	30	Keg	100.00	72.25	10 Prov. 30 Kab
d	Pengawalan dan pendamingan perluas kelapa	471,300	10	Keg	420,465	89.21	10	Keg	100.00	76.97	3 prov. 9 kab
e	Fasilitasi pembentukan LEM petani karet	280,550	1	Keg	280,514	99.99	1	Keg	100.00	50.03	1 Prov. 1 Kab
f	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet	320,800	200	Org	291,999	91.02	200	Org	100.00	72.44	1 Prov. 1 Kab
g	penguatan kelembagaan petani kelapa	203,550	30	Org	192,999	94.82	30	Org	100.00	62.96	1 Prov. 1 Kab
	Fasilitasi pengembangan kelebagaan petani perkebunan	180,600	2	Keg	176,625	97.80	2	Keg	100.00	55.50	1 Prov. 1 Kab
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**12,951,860**			**10,931,447**	**84.40**				**83.07**	**11 Prov 11 Kab**
a	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI kelapa)	185,990	10	Ha	106,823	57.43	5	Ha	50.00	12.83	2 Provinsi
b	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI kelapa)	1,062,980	146	Keg	974,804	91.70	137	Ha	93.84	55.68	11 Prov. 10 Kab
c	Penyediaan benih siap tanam	10,501,322	616,000	Btg	9,032,677	86.01	616,000	Btg	100.00	84.96	7 Provinsi
e	Pengawalan dan Pembinaan penyedia benih kelapa	1,201,568	7	Keg	817,143	68.01	6	Keg	85.71	101.65	6 Provinsi
3	**Dukungan Perlindungan Perlkebunan**	**759,460**			**759,460**	**100.00**				**50.00**	**1 Prov**
a	Denfarm penerapan PHT tanaman kelapa	529,400	225	Ha	529,400	100.00	225	Ha	100.00	50.00	5 Prov. 5 Kab
b	SLPHT tanaman kelapa	230,060	2	KT	230,060	100.00	2	KT	100.00	50.00	1 Prov. 1 Kab
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**8,443,105**			**7,976,385**	**94.47**				**63.82**	**3 Prov 3 Kab**
a	pasca panen kelapa	1,311,635	15	KT	1,307,890	99.71	15	KT	100.00	50.71	1 Prov. 5 Kab
b	Fasilitasi pengolahan kelapa	7,131,470	26	Unit	6,668,495	93.51	26	KT	100.00	66.23	12 Prov. 21 Kab
	TOTAL	**68,128,140**			**55,847,583**	**81.97**				**70.04**	**21 Prov 57 ka**

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan kelapa, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kelapa adalah sebesar 70,04% (efisien). Nilai efisiensi kegiatan dukungan peningkatan produksi kelapa berkisar antara 50 sampai dengan 85,42%. Kegiatan yang tidak efisien yaitu kegiatan pembangunan kebun sumber bahan tanam kelapa dengan nilai efisiensi sebesar 12,53%. Hal ini disebabkan kegiatan terlaksana 50% dengan realisasi fisik lebih kecil daripada realisasi serapan anggaran.

6. Kopi

Pada Tahun 2017, produksi kopi mengalami kenaikan sebesar 0,72% atau 668.683 ton dari 663.871 ton pada tahun 2016. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 1,81% (setara dengan 675.887 ton) mencapai 98,93% masuk dalam katagori **berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga kopi yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif.

Kegiatan Pengembangan tanaman kopi dilaksanakan di 19 provinsi dan 37 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu peremajaan tanaman kopi seluas 1.025 ha, perluasan Tanaman kopi seluas 500 ha, intensifikasi tanaman kopi robusta seluas 8.250 ha, pembangunan kebun induk kopi dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman kopi tersebut seperti pada Tabel 15.

Tabel 15. Pengembangan Tanaman Kopi Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI	KETERANGAN
		KEUANGAN	FISIK		KEUANGAN	(%)	FISIK				
		Rp.(000)	VOLUME	SAT	Rp.(000)		VOLUME	SAT	%	(%)	
1	**Pengembagan Tanaman Kopi**	**62,268,694**			**40,150,900**	**64.48**				**115.77**	**19 Prov 37 Kab**
a	Peremajaan Tanaman Kopi	17,746,875	1,675	Ha	6,994,538	39.41	1,025	Ha	61.19	138.98	8 Prov. 14 Kab
b	Perluasan Tanaman Kopi	10,072,210	580	Ha	6,304,789	62.60	500	Ha	86.21	118.47	7 Prov. 7 Kab
c	Intensifikasi Tanaman Kopi	32,009,574	8,250	Ha	24,979,184	78.04	8,250	Ha	100.00	104.91	19 Prov. 37 Kab
d	Pengawalan dan pendampingan peremajaan kopi	1,210,000	21	Keg	924,877	76.44	19	Keg	90.48	88.79	9 Prov. 22 Kab
e	Pengawalan dan pendamingan perluasan kopi	547,250	10	Keg	290,848	53.15	6	Keg	60.00	78.55	7 Prov. 10 Kab
f	Fasilitasi pembentukan LEM petani karet	436,750	1	Keg	433,150	99.18	1	Keg	100.00	52.06	1 Prov. 1 Kab
g	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani karet	246,035	200	Org	223,514	90.85	200	Org	100.00	72.88	1 Prov. 1 Kab
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**13,552,462**			**10,591,032**	**78.15**				**89.94**	**11 Prov 11 Kab**
a	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (entres kopi)	148,862	3	Ha	114,122	76.66	3	Ha	100.00	108.34	5 Prov 5 Kab
b	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI kopi)	652,783	10	Ha	490,023	75.07	8	Ha	80.00	65.42	5 Prov 5 Kab
c	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI kopi)	266,349	6	Ha	178,900	67.17	5	Ha	83.33	98.50	4 Prov 3 Kab
d	Penyediaan benih siap tanam	12,188,893	4,100,580	Btg	9,585,681	78.64	3,737,504	Btg	91.15	84.29	7 Provinsi
e	Pengawalan dan Pembinaan peneyediaan benih tanaman kopi	948,358	6	Keg	712,329	75.11	6	Keg	100.00	112.22	6 Prov
3	**Dukungan Perlindungan Perlkebunan**	**968,360**			**968,360**	**100.00**				**50.00**	**1 Prov**
a	Denfarm penerapan PHT tanaman kopi	738,300	200	Ha	738,300	100.00	200	Ha	100.00	50.00	5 Prov 5 Kab
b	SLPHT tanamn kopi	230,060	2	KT	230,060	100.00	2	KT	100.00	50.00	5 Prov 5 Kab
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**20,622,450**			**18,322,775**	**88.85**				**77.88**	**3 Prov 3 Kab**
a	Pasca panen kopi	14,752,850	69	KT	13,123,598	88.96	69	KT	100.00	77.61	13 Prov 41 Kab
b	Fasilitasi pengolahan karet	5,869,600	21	Unit	5,199,177	88.58	21	KT	100.00	78.55	8 Prov 20 Kab
	TOTAL	**97,411,966**			**70,033,067**	**71.89**				**103.50**	**19 Prov 37 kab**

Sumber: Direktorat lingkup Ditjen Perkebunan, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan kopi, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kopi adalah sebesar 84,58% (efisien). Nilai efisiensi kegiatan peningkatan produksi tanaman kopi berkisar antara 50% sampai dengan 115,77%. Terdapat

kegiatan yang anomaly karena nilai efisiensi diatas 100% yaitu 1) peremajaan karet dengan NE 138,98%; 2) perluasan tanaman kopi dengan NE 118,47%; 3) intensifikasi kopi dengan NE 104,91%; 4) pembangunan kebun sumber bahan tanan kopi dengan NE 108,34% dan 5) pengawalan dan pembinaan penyediaan benih kopi. Hal ini disebabkan HPS memiliki selisih yang relative besar dengan nilai kontrak atau memiliki selisih lebih besar dari 20% antara serapan dan realisasi fisik yang dicapai.

7. Jambu Mete

Pada Tahun 2017, produksi jambu mete mengalami penurunan sebesar (-3,95%) atau 131.685 ton dari 137.094 ton pada tahun 2016. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 2,39% (setara dengan 140.370 ton) mencapai 93,81% masuk dalam katagori **berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kopi yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga kopi yang kurang stabil dan masih banyaknya tanaman yang sudah berumur kurang produktif, serta curah hujan yang tinggi.

Kegiatan Pengembangan tanaman jambu mete dilaksanakan di 3 provinsi dan 9 Kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu peremajaan tanaman jambu mete seluas 1.650 ha, perluasan tanaman jambu mete seluas 900 ha, penyediaan benih jambu mete sebesar 237.600 batang dan kegiatan pendukung lainnya.

Pelaksanaan kegiatan pengembangan jambu mete tersebut seperti pada tabel 16.

Tabel 16. Pengembangan Tanaman Jambu Mete Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Jambu Mete**	**17,432,420**			**15,981,600**	**91.68**				**70.81**	**9 Prov 37 Kab**
a	Peremajaan Tanaman jambu mete	10,320,120	1,650	Ha	9,354,978	90.65	1,650	Ha	100.00	73.38	2 Prov. 8 Kab
b	Perluasan Tanaman jambu mete	5,976,000	900	Ha	5,562,431	93.08	900	Ha	100.00	67.30	3 Prov. 9 Kab
d	Pengawalan dan pendampingan peremajaan jambu mete	665,000	8	Keg	643,726	96.80	8	Keg	100.00	58.00	2 Prov. 8 Kab
e	Pengawalan dan pendamingan perluasan tanaman jambu mete	471,300	10	Keg	420,465	89.21	10	Keg	100.00	76.97	3 Prov. 9 Kab
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**1,244,568**			**1,234,675**	**99.21**				**(3.80)**	**2 Provinsi**
a	Penyediaan benih siap tanam	1,116,058	297,000	Btg	1,110,804	99.53	237,600	Btg	80.00	(11.03)	1 Provinsi
b	Pengawalan dan Pembinaan peneyediaan benih tanaman jambu mete	128,510	2	Keg	123,871	96.39	2	Keg	100.00	59.02	2 Provinsi
	TOTAL	**18,676,988**			**17,216,275**	**92.18**				**65.84**	**19 Prov 37 kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar, 2017

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan jambu mete, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan jambu mete adalah sebesar 65,84% (efisien). Namun terdapat kegiatan yang tidak efisien yaitu kegiatan penyediaan benih jambu mete dengan nilai

efisiensi (-11,03%). Hal ini disebabkan capaian fisik jauh lebih kecil dari realisasi serapan anggaran yang disebabkan banyaknya benih tanaman yang mati.

8. Kapas

Pada Tahun 2017, produksi kapas mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 44,31%% atau 519 ton dari 932 ton pada tahun 2016. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 3,63% (setara dengan 965 ton) maka mencapai 53,74%, masuk dalam katagori **kurang berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kapas yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga kapas yang kurang menarik dan produktivitas rendah karena iklim, minat petani yang rendah untuk menanam kapas selain itu disebabkan juga anggaran bantuan penanaman kapas yang relativ sangat kecil pada tahun sebelumnya.

Kegiatan Pengembangan tanaman kapas dilaksanakan di 6 provinsi dan 13 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman tanaman kapas seluas 2.463 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapas tersebut seperti dalam Tabel 17.

Tabel 17. Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Jambu Mete**	**6,482,020**			**6,134,577**	**94.64**				**63.40**	**6 Prov 13 Kab**
a	Penanaman Tanaman kapas	5,017,860	2,463	Ha	4,826,115	96.18	2,463	Ha	100.00	59.55	3 Prov. 10 Kab
b	Pengawalan dan pendampingan peremajaan kapas	942,350	12	Keg	894,577	94.93	12	Keg	100.00	62.67	3 Prov. 12 Kab
c	Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan pekebun tanaman kapas	521,810	420	Org	413,885	79.32	420	Keg	100.00	101.71	6 Prov. 13 Kab
	TOTAL	**6,482,020**			**6,134,577**	**94.64**				**63.40**	**19 Prov 37 kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan rempah, diolah 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan kapas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan kapas adalah sebesar 63,40% (efisien).

9. Nilam

Pada Tahun 2017, produksi nilam mengalami penurunan sebesar (-3,51% atau 2.115 ton dari 2.192 ton pada tahun 2016. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 0,72% (setara dengan 2.207 ton) mencapai 95,80% masuk dalam katagori **berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan nila yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga nilam yang kurang stabil dan factor anomaly iklim yang menyebabkan keraguan petani.

Kegiatan Pengembangan tanaman nilam dilaksanakan di 11 provinsi dan 18 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman nilam seluas 166 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan nilam tersebut seperti pada Tabel 18.

Tabel 18. Pengembangan Tanaman Nilam Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Nilam**	**7,746,225**			**5,291,049**	**68.30**				**97.54**	**11 Prov 18 Kab**
a	Penanaman nilam	6,300,125	201	Ha	4,178,412	66.32	166	Ha	82.59	99.23	8 Prov. 18 Kab
b	Pengawalan dan pendampingan nilam	855,000	24	Keg	656,127	76.74	24	Ha	100.00	108.15	7 Prov. 7 Kab
c	Fasilitasi temu pelaku usaha nilam	204,950	200	Org	136,131	66.42	140	Ha	Org	62.78	10 Provinsi
d	pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman nilam	386,150	340	Org	320,379	82.97	300	Org	88.24	64.93	10 Provinsi
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**801,645**			**604,145**	**75.36**				**73.39**	**11 Prov 11 Kab**
a	Pemeliharaan KSB/PIT nilam	148,862	3	Ha	114,122	76.66	3	Ha	100.00	108.34	5 Prov 5 Kab
b	Identifikasi caon KSB tanaman Semusim dan rempah (nilam dan gambir)	652,783	10	Ha	490,023	75.07	8	Ha	80.00	65.42	5 Prov 5 Kab
	TOTAL	**8,547,870**			**5,895,194**	**68.97**				**95.28**	**11 Prov 18 kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan nilam, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan nilam adalah sebesar 95,28% (efisien). Kegiatan yang terjadi anomaly yaitu pengawalan dan pendampingan (108,15%) dan kegiatan pemeliharaan KSB/PIT nilam (108,34%) disebabkan capaian fisik memiliki selisih selisih lebih dari 20% dari penggunaan anggaran.

10. Tembakau

Pada Tahun 2017, produksi nilam mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 20,30% atau 152.452 ton dari pada tahun 2016 sebesar 126.728 ton. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 6,89% (setara dengan 135.459 ton) mencapai 112,54% masuk dalam katagori sangat **berhasil**. Permasalahan yang

dihadapi dalam pengembangan tembakau yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani.

Kegiatan Pengembangan tanaman tembakau dilaksanakan di 14 provinsi dan 3 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu penanaman tembakau seluas 25 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tembakau tersebut seperti pada Tabel 19.

Tabel 19. Pengembangan Tanaman Tembakau Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Tembakau**	**850,245**			**695,213**	**81.77**				**95.58**	**14 Prov 3 Kab**
a	Pengembangan tembakau	190,875	25	Ha	154,113	80.74	25	Ha	100.00	98.15	1 Prov. 1 Kab
b	Pengawalan dan pendampingan pengembangan tembakau	459,370	14	Keg	367,643	80.03	14	Ha	100.00	99.92	14 Provinsi
c	Fasilitasi pengembangan kelembagaan petani pekebun	200,000	2	Keg	173,457	86.73	2	Keg	Keg	83.18	2 Prov. 2 Kab
	TOTAL	**850,245**			**695,213**	**81.77**				**95.58**	**14 Prov 3 kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan pengembangan tembakau, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan tembakau adalah sebesar 95,58 (efisien).

11. Lada

Pada Tahun 2017, produksi lada mengalami kenaikan sebesar 0,81% atau 870.029 ton dari pada tahun 2016 sebesar 86.334 ton. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 1,15% (setara dengan 87.326 ton) mencapai 99,66% masuk dalam katagori

berhasil. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan nila yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga lada yang kurang stabil dan factor anomaly iklim yang menyebabkan produktivitas turun.

Kegiatan Pengembangan tanaman lada dilaksanakan di 9 provinsi dan 18 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu rehabilitasi lada seluas 600 ha, perluasan lada seluas 691 ha, intensifikasi tanaman lada seluas 2.550 ha, pembangunan kebun induk tanaman lada seluas 14 ha, penyediaan benih lada 310.000 batangg dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan lada tersebut seperti pada Tabel 20.

Tabel 20. Pengembangan Tanaman Lada Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Lada**	**26,276,265**			**21,917,400**	**83.41**				**72.16**	**9 Prov 18 Kab**
a	Rehabilitasi Tanaman lada	4,470,000	600	Ha	4,222,800	94.47	600	Ha	100.00	63.83	1 Prov. 3 Kab
b	Perluasan Tanaman lada di lahan kering	13,150,200	825	Ha	9,987,794	75.95	691	Ha	83.76	73.30	5 Prov. 10 Kab
c	Intensifikasi Tanaman lada	6,619,500	2,580	Ha	6,047,671	91.36	2,580	Ha	100.00	71.60	8 Prov. 18 Kab
d	Pengawalan dan pendampingan perluasan lada	1,017,750	25	Keg	758,277	74.51	24	Keg	96.00	105.98	9 Prov. 16 Kab
e	Pengawalan dan pendamingan perluasan lada	205,740	5	Keg	200,537	97.47	5	Keg	100.00	56.32	2 Prov. 4 Kab
f	Indikasi geografis tanaman	213,075	3	Keg	121,814	57.17	2	Keg	66.67	85.61	3 Provinsi
g	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani lada	600,000	330	Org	578,507	96.42	330	Org	100.00	58.96	8 Provinsi
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**3,485,720**			**3,119,298**	**89.49**				**62.18**	**8 Prov 12 Kab**
a	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI lada)	1,435,824	14	Ha	1,179,727	82.16	12	Ha	85.71	60.36	6 Prov, 7 Kab
b	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI lada)	453,113	35	Ha	434,933	95.99	35	Ha	100.00	60.03	8 Prov. 12 Kab
c	Penyediaan benih siap tanam	1,596,783	310,000	Btg	1,504,638	94.23	310,000	Btg	100.00	64.43	3 Provinsi
3	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**1,357,696**			**1,308,876**	**96.40**				**58.99**	**3 Prov 3 Kab**
a	Pasca panen lada	897,696	6	KT	863,942	96.24	6	KT	100.00	59.40	1 Prov. 2 Kab
b	Fasilitasi pengolahan lada	460,000	2	Unit	444,934	96.72	2	KT	100.00	58.19	2 Prov 4 Kab
	TOTAL	**31,119,681**			**26,345,574**	**84.66**				**70.47**	**9 Prov 18 Kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi

kegiatan pengembangan lada adalah sebesar 70,47% (efisien). Nilai efisiensi berkisar antara 56,32 sampai dengan 105,98%. Kegiatan yang anomaly efisiensi yaitu pengawalan dan pendampingan perluasan pala karena selisih realisasi fisik dan serapan anggaran lebih besar dari 20%.

12. **Pala**

Pada Tahun 2017, produksi nilam mengalami kenaikaan sebesar 3,24% atau 34.385 ton dari pada tahun 2016 sebesar 33.305 ton. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 4,74% (setara dengan 34.883 ton) mencapai 98,57% masuk dalam katagori **berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pala yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga pala yang kurang stabil dan factor anomaly iklim yang menyebabkan produktivitas turun.

Kegiatan Pengembangan tanaman pada dilaksanakan di 19 provinsi dan 31 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu rehabilitasi pala seluas 10.215 ha, intensifikasi tanaman pala seluas 3.070 ha, perluasan tanaman pala di lahan kering seluas 15.477 ha, pembangunan kebun sumber bahan tanam (kebun induk pala) seluas 18 ha, pemeliharaan kebun induk pala seluas 11 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pala tersebut seperti pada Tabel 21.

Tabel 21. Pengembangan Tanaman Pala Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Pala**	**77,546,287**			**73,322,298**	**94.55**				**63.62**	**19 Prov 31 Kab**
a	Rehabilitasi Tanaman Pala	28,343,660	10,215	Ha	26,386,812	93.10	10,215	Ha	100.00	67.26	7 Prov 26 Kab
b	Perluasan Tanaman Pala dilahan kering	39,345,842	15,477	Ha	37,762,449	95.98	15,477	Ha	100.00	60.06	6 Prov. 27 Kab
c	Intensifikasi Tanaman Pala	5,371,160	3,070	Ha	5,274,088	98.19	3,070	Ha	100.00	54.52	5 Prov. 13 Kab
d	Pengawalan dan pendamingan	3,835,625	52	Keg	3,304,999	86.17	52	Keg	100.00	84.59	9 Prov. 31 Kab
e	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani pala	650,000	400	Org	593,950	91.38	400	Org	100.00	71.56	6 Prov. 5 Kab
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**845,778**			**836,762**	**98.93**				**52.67**	**19 Prov 11 Kab**
a	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI Pala)	407,059	16	Ha	398,043	97.79	16	Ha	100.00	55.54	4 Prov 3 Kab
b	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (KI Pala)	56,003	11	Ha	56,003	100.00	11	Ha	100.00	50.00	5 Prov. 6 Kab
c	Penyediaan benih siap tanam	382,716	80,000	Btg	382,716	100.00	80,000	Btg	100.00	50.00	19 Provinsi
3	**Dukungan Perlindungan Perlkebunan**	**745,860**			**745,800**	**99.99**				**50.02**	**1 Prov**
a	Denfarm penerapan PHT tanaman Pala	520,400	200	Ha	520,400	100.00	200	Ha	100.00	50.00	1 Prov. 1 Kab
b	SLPHT pala	225,460	2	KT	225,400	99.97	2	KT	100.00	50.07	1 Prov. 1 Kab
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**5,570,680**			**5,520,108**	**99.09**				**52.27**	**3 Prov 3 Kab**
a	Pasca panen pala	4,031,200	16	KT	4,001,918	99.27	16	KT	100.00	51.82	4 Prov 10 Kab
b	Fasilitasi pengolahan Atsiri	1,539,480	3	Unit	1,518,190	98.62	3	KT	100.00	53.46	1 Prov 3 Kab
	TOTAL	**84,708,605**			**80,424,968**	**94.94**				**62.64**	**19 Prov 31 Kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai efisiensi kegiatan pengembangan pala adalah sebesar 62,64% (efisien). Nilai efisiensi berkisar antara 50% sampai dengan 84,59%.

13. Cengkeh

Pada Tahun 2017, produksi cengkeh mengalami penurunan sebesar (-11,34%) atau 123.773 ton dari 139.611 ton pada tahun 2016. Jika dibandingkan target kinerja yaitu meningkat 1,85% (setara dengan 142.193 ton) mencapai 87,05% masuk dalam katagori **berhasil**. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan nila yaitu sulitnya memperoleh pupuk ditingkat petani, harga cengkeh yang

kurang stabil dan factor anomaly iklim yang menyebabkan turunnya produktivitas, dan banyak tanaman yang kurang produktiv lagi umur tanaman.

Kegiatan Pengembangan tanaman cengkeh dilaksanakan di 15 provinsi dan 30 kabupaten. Kegiatan yang dilakukan yaitu rehabilitasi tanaman cengkeh seluas 3.839 ha, perluasan tanaman cengkeh dilahan kering seluas 5.660 ha, intensifikasi tanaman cengkeh seluas 2.800 ha, pembangunan kebun induk cengkeh seluas 23 ha, pemeliharaan kebun induk cengkeh seluas 25 ha dan kegiatan pendukung lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman cengkeh tersebut seperti pada Tabel 22.

Tabel 22. Pengembangan Tanaman Cengkeh Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TARGET			REALISASI					NILAI EFESIENSI (%)	KETERANGAN
		KEUANGAN Rp.(000)	FISIK VOLUME	SAT	KEUANGAN Rp.(000)	(%)	FISIK VOLUME	SAT	%		
1	**Pengembagan Tanaman Pala**	**43,441,172**			**38,750,625**	**89.20**				**71.99**	**15 Prov 30 Kab**
a	Rehabilitasi Tanaman Cengkeh	11,636,778	3,989	Ha	10,562,936	90.77	3,839	Ha	96.24	64.20	7 Prov 23 Kab
b	Perluasan Tanaman Cengkeh dilahan kering	22,735,544	5,660	Ha	20,300,313	89.29	5,660	Ha	100.00	76.78	13 Prov. 30 Kab
c	Intensifikasi Tanaman Cengkeh	7,416,250	3,000	Ha	6,396,290	86.25	2,800	Ha	93.33	68.98	13 Prov. 26 Kab
d	Fasilitasi Pengembangan kelembagaan petani petani dan pekebun cengkeh	552,600	7	Keg	458,927	83.05	7	Keg	100.00	92.38	3 Provinsi
e	Pelatihan penumbuhan kebersamaan petani cengkeh	1,100,000	660	Org	1,032,159	93.83	660	Org	100.00	65.42	15 Provinsi
2	**Dukungan Perbenihan Perkebunan**	**532,128**			**463,976**	**87.19**				**80.39**	**11 Prov 11 Kab**
a	Pembangunan kebun sumber bahan tanam (KI cengkeh)	448,254	23	Ha	380,715	84.93	23	Ha	100.00	87.67	6 Prov. 5 Kab
b	Pemeliharaan kebun sumber bahan tanan (PIT cengkeh)	83,874	25	Ha	83,261	99.27	24	Ha	96.00	41.49	10 Prov. 13 Kab
3	**Dukungan Perlindungan Perlkebunan**	**745,860**			**745,800**	**99.99**				**50.02**	**1 Prov**
a	Denfarm penerapan PHT tanaman Pala	520,400	200	Ha	520,400	100.00	200	Ha	100.00	50.00	1 Prov. 1 Kab
b	SLPHT pala	225,460	2	KT	225,400	99.97	2	KT	100.00	50.07	1 Prov. 1 Kab
4	**Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan**	**2,514,750**			**2,481,453**	**98.68**				**53.31**	**3 Prov 3 Kab**
a	Pasca panen cengkeh	2,514,750	14	KT	2,481,453	98.68	14	KT	100.00	53.31	6 Prov 11 Kab
	TOTAL	**47,233,910**			**42,441,854**	**89.85**				**70.74**	**15 Prov 30 Kab**

Sumber: Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, 2018

Jika mengacu pada PMK 249 Tahun 2011, dari analisis pencapaian kinerja kegiatan diatas, dapat dijelaskan bahwa nilai eflsiensi kegiatan pengembangan tanaman cengkeh adalah sebesar 70,74% (efisien). Nilai efisiensi berkisar antara 50% sampai dengan 92,38%.

3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun ini terhadap Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pencapaian kinerja Tahun 2017 jika dibandingkan terhadap pencapaian kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 24.

Tabel 24. Pencapaian Kinerja Tahun 2017 Dibanding Pencapaian Kinerja Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016

Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja 2014 (%)			Capaian Kinerja 2015 (5)			Capaian Kinerja 2016 (%)			Capaian Kinerja 2017 (%)			2017 dibanding 2014 (%)	2017 dibanding 2015 (%)	2017 dibanding 2016 (%)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Rata-rata Pertumbuhan produksi tanaman tebu (%)	100.00	101.10	101.10	112.91	101.94	90.28	110.03	98.99	90.00	107.03	96.36	90.03	89.05	99.72	111.32
Rata-rata Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya (%)	100.00	104.32	104.32	105.89	105.45	99.58	102.45	105.64	103.11	102.90	99.27	96.47	92.48	96.87	93.56

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan, diolah 2018

Berdasarkan Tabel 24 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu Tahun 2017 sebesar 90,03%, jika dibanding rata-rata pertumbuhan produksi Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut:
   a. Dibanding kinerja Tahun 2014 produksi tanaman tebu (GKP) mengalami penurunan sebesar (-7,52%).
   b. Dibanding kinerja Tahun 2015 produksi tanaman tebu (GKP) mengalami penurunan sebesar (-3,13%).

c. Dibanding kinerja Tahun 2016 produksi tanaman tebu (GKP) mengalami peningkatan sebesar 11,32%.

2. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya Tahun 2017 dibanding rata-rata pertumbuhan produksi Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut:

a. Dibanding kinerja Tahun 2014 produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mengalami penurunan sebesar (-7,52%).

b. Dibanding kinerja Tahun 2015 produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mengalami penurunan sebesar (-3,13%).

c. Dibanding kinerja Tahun 2016 produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mengalami peningkatan sebesar (-0,44%).

Perbandingan kinerja Tahun 2016 dan kinerja Tahun 2015 dan kinerja Tahun 2014 per komoditas perkebunan unggulan lainnya dapat disajikan pada Tabel 25.

Tabel 25. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Tahun 2015 Dan Tahun 2014 per Komoditas

NO	KOMODITAS	KINERJA (%)							KINERJA 2017 DIBANDING 2014	KINERJA 2017 DIBANDING 2015	KINERJA 2017 DIBANDING 2016
		2014	2015		2016		2017				
		Kinerja (%)	Target (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Kinerja (%)			
1	Kakao	101.05	116.35	70.01	102.45	108.05	104.93	100.21	99.17	143.14	92.74
2	Teh	106.12	116.35	73.84	102.45	106.00	100.48	100.31	94.52	135.85	94.63
3	Kelapa Sawit	105.39	116.35	91.21	102.45	104.39	105.87	119.17	113.08	130.65	114.15
4	Sagu	100.34	116.35	117.29	102.45	101.42	102.90	100.56	50.19	85.74	99.15
5	Pala	116.20	116.35	88.53	102.45	99.63	104.74	103.24	88.85	116.62	103.63
6	Tembakau	120.59	116.35	83.99	102.45	98.80	106.89	120.30	99.76	143.23	121.76
7	Lada	96.06	116.35	80.10	102.45	98.41	101.15	100.81	104.94	125.84	102.44
8	Karet	97.40	116.35	85.74	102.45	97.99	103.52	108.08	110.96	126.06	110.29
9	Kopi	95.26	116.35	85.35	102.45	97.59	101.81	100.72	105.73	118.01	103.21
10	Cengkeh	111.34	116.35	98.27	102.45	97.53	101.85	88.66	79.63	90.22	90.91
11	Kemiri Sunan	300.00	116.35	325.17	102.45	97.35	101.19	100.00	33.33	30.75	102.72
12	Kelapa	98.50	116.35	83.51	102.45	96.61	101.36	98.85	100.35	118.37	102.32
13	Nilam	101.01	116.35	81.17	102.45	96.04	100.72	96.49	95.52	118.88	100.47
14	Jambu Mete	113.08	116.35	90.06	102.45	92.28	102.39	96.05	84.94	106.66	104.09
15	Kapas	40.67	116.35	85.72	102.45	91.95	103.63	55.69	136.91	64.96	60.56
	Total/Rata-Rata	**104.32**	**116.35**	**89.58**	**102.45**	**103.11**	**102.90**	**99.27**	**93.19**	**110.33**	**100.20**

Sumber: Statistik Ditjen Perkebunan, diolah 2018

Berdasar Tabel 25 di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Pencapaian kinerja Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Tahun 2014 secara umum mengalami penurunan sebesar (-6,81%). Jika di lihat per komoditas kinerja tertinggi secara berurutan yaitu kapas (136,91%), kelapa sawit (113,08%), karet (110,96%), kopi (105,73%), lada (104,94%), kelapa 100,35%) dan seterusnya komoditas lainnya mengalami penurunan.
2. Pencapaian kinerja Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Tahun 2015 secara umum mengalami peningkatan sebesar 10,33%. Jika di lihat per komoditas dapat dilihat pada tabel diatas.
3. Pencapaian kinerja Tahun 2017 jika dibandingkan dengan Tahun 2016 secara umum mengalami peningkatan sebesar 0,20%. Jika di lihat per komoditas dapat dilihat pada tabel diatas.

3.1.3. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra

Pencapaian kinerja Tahun 2017 jika dibandingkan terhadap target Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 26.

Tabel 26. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 terhadap Target Renstra Tahun 2015-2019 Per Komoditas

NO	INDIKATOR	TARGET IKP PER TAHUN					RATA-RATA	AKUMULASI S.D 2019
		2015	2016	2017	2018	2019		
1	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu	12.91	10.03	7.03	4.57	4.37	7.78	
2	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya	16.35	2.45	2.9	2.89	2.86	5.49	
		TARGET IKP SAMPAI DENGAN TAHUN INI						
1	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu	112.91	124.23	132.97	139.05	145.12		145.12
2	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya	116.35	119.20	122.66	126.20	129.81		129.81
		REALISASI IKP SAMPAI DENGAN TAHUN INI						
1	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Tebu	89.30	80.00	89.05		61.36		61.36
2	Rata-rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan Lainnya	95.46	98.84	93.19		71.79		71.79

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan 2015-2019, 2018

Target sasaran program (*outcomes*) sesuai Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 merupakan target jangka menengah yang ditunjukkan oleh capaian produksi pada Tahun 2019. Oleh karena itu sesuai dengan target IKP Per Tahun dan di konversi menjadi target IKP sampai dengan tahun ini sedangkan pengukurannya ditentukan oleh tahun dasar dalam penentuan target IKP yaitu capaian produksi Tahun 2014. Berdasarkan analisis ini diperoleh capaian kinerja Tahun 2017 dibandingkan sasaran Renstra (target IKP sampai dengan Tahun 2019) sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja Tahun 2017, Rata-rata pertumbuhan produksi tebu sebesar 96,36% dibanding Tahun 2014 sebesar 89,05%, kinerja ini jika dibanding dengan target dalam Renstra Tahun 2019 sebesar 145,12% baru mencapai 61,36%. Ini berarti untuk mencapai target Renstra dengan waktu 2 tahun yang tersisa Ditjen perkebunan masih memiliki tanggung jawab sebesar 83,76% harus mampu meningkat produksi tebu (GKP).

2. Pencapaian kinerja Tahun 2017, Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya 99,87%, dibanding Tahun 2014 sebesar 98,84%, kinerja ini jika dibanding dengan target dalam Renstra Tahun 2019 sebesar 129,81% baru mencapai 71,79%. Ini berarti untuk mencapai target Renstra dengan waktu 2 tahun yang tersisa Ditjen perkebunan masih memiliki tanggung jawab rata-rata meningkatkan komoditas perkebunan unggulan lainnya sebesar 58,02%. Yang telah mencapai target dalam Renstra yaitu : (tambahkan penjelasan per komoditas, kelapa sawit, dll)

3.2. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran sebesar Rp. 1.148.531.631.000,-. Terdiri dari APBN sebesar Rp. 490.963.166.000,- dan dana APBN-P sebesar Rp. 657.756.465.000,-.

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 944.912.822.839,- atau 82,27% dibanding pagu anggaran Rp. 1.148.531.631.000,- dengan capaian fisik sebesar 90,08%. Realisasi anggaran ini dapat dilihat berdasarkan kegiatan Utama dan Kegiatan (output) Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, berdasarkan jenis belanja, berdasarkan kewenangan dan berdasarkan satker lingkup Ditjen Perkebunan.

3.2.1. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Utama

Realisasi anggaran berdasarkan kegiatan utama Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Realisasi dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2017 Berdasarkan Kegiatan Utama

NO	KODE / NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI		% Fisik
		(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	%	
1	1777 PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	461,803,189,000	355,192,633,089	76.91	83.37
2	1779 DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	37,792,262,000	35,047,669,388	92.74	100.00
3	1780 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN	136,782,903,000	122,654,776,151	89.67	100.00
4	1781 DUKUNGAN PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH SERTA PENERAPAN TEKNOLOGI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	66,330,473,000	62,256,596,687	93.86	99.79
5	5888 PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	265,058,628,000	238,789,828,926	90.09	96.08
6	5889 DUKUNGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	66,469,331,000	60,855,377,575	91.55	99.05
7	5890 DUKUNGAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN	114,294,845,000	70,115,941,523	61.35	77.29
	TOTAL	1,148,531,631,000	944,912,823,339	82.27	90.08

Sumber: SMART Kemenkeu, 2018 (diolah)

Berdasarkan Tabel 32 dapat dijelaskan bahwa capaian serapan Ditjen Perkebunan dikelompokkan berdasarkan kegiatan utama adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 76,91% dan capaian fisik sebesar 83,37%.
2. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 92,75% dan capaian fisik sebesar 100,00%.

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan penyerapan anggaran sebesar 89,68% dan capaian fisik sebesar 100,00%.
4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 93,86% dan capaian fisik sebesar 99,79%.
5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan penyerapan anggaran sebesar 90,10% dan capaian fisik sebesar 96,08%.
6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan penyerapan sebesar 91,55% dan capaian fisik sebesar 99,05%.
7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan anggaran sebesar 61,35% dan capaian fisik sebesar 77,29%.

3.2.2.Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Penyerapan anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Realisasi keuangan dan fisik kegiatan berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel 31.

Tabel 31. Serapan dan Capaian Fisik Kegiatan Ditjen Perkebunan Tahun 2017 Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	% Fisik
1	BELANJA PEGAWAI	78,000,000,000	71,816,546,378	92.07	97.05
2	BELANJA BARANG	1,064,916,729,000	868,146,868,336	81.52	89.14
3	BELANJA MODAL	5,614,902,000	4,949,408,625	88.15	91.11
	TOTAL	1,148,531,631,000	944,912,823,339	82.27	90.08

Sumber: SMART Kemenkeu, 2017 (diolah)

Capaian serapan berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 92,07% dengan capaian fisik sebesar 97,05%.
2. Belanja Barang terealisasi sebesar 81,52% dengan capaian fisik sebesar 89,14%.
3. Belanja Modal terealisasi sebesar 88,15% dengan capaian fisik sebesar 91,11%.

3.2.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan Ditjen Perkebunan

Realisasi Anggaran berdasarkan output kegiatan mencerminkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang biasanya menjadi kegiatan yang masuk dalam perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Lingkup Ditjen Perkebunan. Realisasi berdasarkan Output Kegiatan secara terinci dijelaskan pada Lampiran 3. Secara umum capaian output kegiatan Ditjen Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar yaitu:

a. Pengembangan Tanaman Kopi dengan serapan sebesar 75,87% dan capaian fisik 75,96%.
b. Pengembangan Tanaman Kakao dengan serapan sebesar 72,67% dan capaian fisik 87,45%.
c. Pengembangan Tanaman Karet dengan penyerapan sebesar 86,29% dan capaian fisik sebesar 86,61%.
d. Pengembangan Tanaman Kelapa dengan serapan sebesar 68,48% dan capaian fisik sebesar 87,92%.
e. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya dengan serapan sebesar 72,95% dan capaian fisik sebesar 100,00%.

2. Dukungan Perlindungan Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan dukungan perlindungan perkebunan antara lain yaitu:

a. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 93,62% dan capaian fisik 100,00%.

b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dengan serapan sebesar 91,35% dan capaian fisik 100,00%.

c. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dengan serapan sebesar 92,96% dan capaian fisik 100,00%.

d. Bimbingan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 98,52% dan capaian fisik 100,00%.

e. Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dengan serapan sebesar 92,78% dan capaian fisik 100,00%.

f. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan serapan sebesar 84,25% dan capaian fisik 100,00%.

3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknsi Lainnya yaitu:

1. Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan serapan sebesar 95,81% dan capaian fisik 100,00%.
2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan serapan sebesar 85,14% dan capaian fisik 100,00%.
3. Layanan Internal dengan serapan sebesar 79,50% dan capaian fisik 100,00%.
4. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 86,76% dan capaian fisik 100,00%.
5. Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan serapan sebesar 94,80% dan capaian fisik 96,74%.
6. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 92,81% dan capaian fisik 94,64%.
7. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan serapan sebesar 96,35% dan capaian fisik 98,82%.

4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan yaitu:

1. Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 96,76% dan capaian fisik 100,00%;
2. Pengembangan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 96,19% dan capaian fisik 93,33%;
3. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 88,37% dan capaian fisik 100,00%;
4. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dengan serapan sebesar 94,83% dan capaian fisik 100,00%.
5. Layanan Internal (Overhead) dengan serapan sebesar 96,54% dan capaian fisik 100,00%
6. Layanan Perkantoran dengan serapan sebesar 93,54% dan capaian fisik 100,00%.

5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah yaitu:

1. Pengembangan Tanaman tebu dengan serapan sebesar 79,34% dan capaian fisik 83,67%.

2. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnyadengan serapan sebesar 93,91% dan capaian fisik 93,09%.
3. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan serapan sebesar 87,74% dan capaian fisik 100,00%.
4. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan serapan sebesar 87,42% dan capaian fisik 100,00%.

6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan yaitu:

1. Fasilitasi pasca panen tanaman perkebunan dengan serapan sebesar 92,34% dan capaian fisik 100,00%;
2. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 93,81% dan capaian fisik 100,00%;
3. Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 89,94% dan capaian fisik 97,56%;
4. Pengembangan Penerapan Standarisasi Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan dengan serapan sebesar 89,12% dan capaian fisik 100,00%;
5. Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan serapan sebesar 96,29% dan capaian fisik 100,00%;

7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Realisasi keuangan dan capaian fisik kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan yaitu:

1. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 52,25% dan capaian fisik 53,06%
2. Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan dengan serapan sebesar 84,58% dan capaian fisik 100,00%.

3.2.4. Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker Lingkup Ditjen Perkebunan

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia sebanyak 514 yang tersebar di 34 provinsi. Dengan keterbatasan APBN, untuk memenuhi rasa keadilan dan ketidakberpihakan kepada kebupaten/kota yang ingin melaksanakan pembangunan perkebunan, maka pada Tahun 2017 Satker yang mengelolaan dana APBN baik Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan di kelola oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan. Oleh karena itu pada Tahun 2017 penyelenggaraan pembangunan perkebunan dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yang berjumlah 38 satker yang terdiri atas Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat), Satker UPT Pusat (4 satker) dan Satker Dinas Provinsi (33 satker).

Kinerja Ditjen Perkebunan sangat tergantung pada kinerja satker-satkernya, oleh karena itu upaya percepatan dan pencapaian target terus dilakukan dengan cara koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi.

Dengan didukung oleh Tim Monev lingkup Ditjen Perkebunan baik pusat dan daerah dan dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan Tahun 2016 telah mampu diperoleh informasi secara *up to date* setiap bulanan sehingga setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan terinfo ke pimpinan Ditjen Perkebunan.

Capaian Satker tersebut dilakukan evaluasi dan analisis sehingga seecara sederhana diperoleh prestasi satker yang secara triwulanan disampaikan kepada Gubernur sebagai penaggungjawab daerah dan para Unit Eselon II lingkup Ditjen Perkebunan sebagai penanggungjawab kegiatan.

Capaian fisik dan keuangan per satker lingkup Ditjen Perkebunan dapat dilihat pada tabel 32 dan tabel 33 berikut.

Tabel 32. Daftar Capaian Satker Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan Tahun 2017

NO	SAKKER LINGKUP DITJEN PERKEBUNAN	PAGU (RP)	REALISASI			CAPAIAN	
			KEUANGAN (RP)	%	% FISIK	TARGET MENTERI (50%)	
A	SATKER DAERAH						
1	179062 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI UTARA	42,746,740,000	42,077,002,055	98.43	99.95	98.43	BERHASIL
2	319057 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	19,891,104,000	19,266,866,750	96.86	100.00	96.86	BERHASIL
3	330023 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	7,801,020,000	7,518,355,500	96.38	100.00	96.38	BERHASIL
4	289035 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	87,632,302,000	84,235,614,000	96.12	100.00	96.12	BERHASIL
5	189084 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	27,831,388,000	26,360,304,800	94.71	97.22	94.71	BERHASIL
6	049058 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROV D.I.YOGYAKARTA	4,024,794,000	3,809,817,955	94.66	100.00	94.66	BERHASIL
7	149067 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	33,730,163,000	31,675,198,173	93.91	100.00	93.91	BERHASIL
8	219001 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	24,036,811,000	22,539,151,800	93.77	95.75	93.77	BERHASIL
9	249031 DINAS PERTANIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	43,687,116,000	40,697,230,670	93.16	94.45	93.16	BERHASIL
10	269065 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	14,859,344,000	13,582,522,075	91.41	92.13	91.41	BERHASIL
11	159064 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	17,080,436,000	15,431,911,408	90.35	98.12	90.35	BERHASIL
12	299347 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3,363,807,000	3,034,857,750	90.22	91.37	90.22	BERHASIL
13	060100 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH	24,362,461,000	21,934,093,288	90.03	99.50	90.03	BERHASIL
14	079077 DINAS PERKEBUNAN PROV SUMATERA UTARA	27,070,839,000	24,214,816,103	89.45	92.05	89.45	BERHASIL
15	239072 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	21,155,616,000	18,922,686,672	89.45	91.97	89.45	BERHASIL
16	309033 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	18,320,152,000	16,357,927,580	89.29	93.75	89.29	BERHASIL
17	109071 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI JAMBI	28,295,966,000	25,095,004,275	88.69	90.97	88.69	BERHASIL
18	340999 DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	22,520,248,000	19,947,788,900	88.58	94.12	88.58	BERHASIL
19	209008 DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	60,483,286,000	52,005,612,900	85.98	95.29	85.98	BERHASIL
20	119081 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	47,767,481,000	40,415,304,177	84.61	97.02	84.61	BERHASIL
21	029101 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT	33,571,503,000	28,027,601,432	83.49	100.00	83.49	BERHASIL
22	329027 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN	650,246,000	525,091,600	80.75	87.98	80.75	BERHASIL
23	139076 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	10,454,931,000	8,375,053,550	80.11	85.51	80.11	BERHASIL
24	169066 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	7,876,407,000	5,994,257,200	76.10	86.16	76.10	CUKUP BERHASIL
25	089083 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	37,915,810,000	28,641,360,383	75.54	98.04	75.54	CUKUP BERHASIL
26	199078 DINAS PERKEBUNAN PROPINSI SULAWESI SELATAN	52,964,385,000	39,976,039,896	75.48	79.88	75.48	CUKUP BERHASIL
27	259060 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA	7,988,040,000	5,950,214,420	74.49	98.86	74.49	CUKUP BERHASIL
28	129072 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI LAMPUNG	41,084,476,000	28,054,711,150	68.29	75.30	68.29	CUKUP BERHASIL
29	350036 DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	3,547,736,000	2,341,155,335	65.99	85.61	65.99	CUKUP BERHASIL
30	039098 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	56,198,479,000	36,105,115,292	64.25	65.94	64.25	CUKUP BERHASIL
31	059114 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR	55,973,409,000	30,103,628,790	53.78	60.69	53.78	KURANG BERHASIL
32	229061 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BALI	28,994,400,000	14,141,213,422	48.77	86.83	48.77	KURANG BERHASIL
33	099270 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU	44,937,510,000	17,947,446,875	39.94	47.17	39.94	KURANG BERHASIL
	SUB TOTAL	**958,818,406,000**	**775,304,956,176**	**80.86046**	**85.65**		

Sumber: SMART Kemenkeu, 2017 (diolah)

Tabel 33. Daftar Capaian Satker Pusat dan UPT Pusat lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2017

B	SATKER UPT PUSAT						
1	BALAI BESAR (BBP2TP) AMBON	15,144,431,000	14,471,201,093	95.55	100.00	95.55	BERHASIL
2	BALAI BESAR (BBP2TP) MEDAN	25,042,684,000	23,688,681,367	94.59	95.45	94.59	BERHASIL
3	BALAI BESAR (BBP2TP) SURABAYA	19,942,554,000	18,752,865,152	94.03	100.00	94.03	BERHASIL
4	BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN PONTIANAK	11,224,086,000	10,096,215,525	89.95	92.46	89.95	BERHASIL
	SUB TOTAL	71,353,755,000	67,008,963,137	93.91	95.43		
C	SATKET PUSAT DITJEN PERKEBUNAN						
1	DUKUNGAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	5,319,522,000	5,050,349,489	94.94	94.94	94.94	BERHASIL
2	DUKUNGAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN	6,657,625,000	6,245,477,001	93.81	93.81	93.81	BERHASIL
3	DUKUNGAN PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN	7,942,995,000	7,050,929,870	88.77	88.77	88.77	BERHASIL
4	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PERKEBUNAN	83,868,812,000	71,970,093,444	85.81	85.81	85.81	BERHASIL
5	PENGEMBANGAN TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	7,144,766,000	6,071,626,154	84.98	84.98	84.98	BERHASIL
6	PENGEMBANGAN TANAMAN SEMUSIM DAM REMPAH	7,425,750,000	6,210,427,568	83.63	83.63	83.63	BERHASIL
	SUB TOTAL	118,359,470,000	102,598,903,526	86.68	90.01		

Sumber: SMART Kemenkeu, 2017 (diolah)

3.2.5. Permasalahan Umum Realisasi Anggaran Tahun 2017

Dalam mendukung keberhasilan pembangunan perkebunan ke depan diperlukan Analisis Permasalahan dan mengidentifikasi isue strategis dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

Permasalahan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Tahun fiskal yang tidak sinkron dengan kalender tanam;
2. Dampak perubahan iklim menyebabkan anomali iklim yang berakibat pada kurang dipahaminya pola budidaya yang baik oleh pekebun;
3. Permodalan petani yang masih belum memadai, sehingga pekebun swadaya murni sulit ditemukan;
4. Jaringan irigasi dan prasarana terutama jalan, jembatan, pelabuhan yang belum memadai;

5. Keraguan pelaksanaan kegiatan di satker karena waktu yang sangat terbatas serta adanya kegiatan fisik yang diswakelokan antara lain penyediaan benih sementara pedomannya terlambat diterima;
6. Keterbatasan dan perubahan SDM di Satker;
7. Koordinasi antar lini lingkup satker masih belum solid dan kurang akomodatif, sehingga persiapan pelaksanaan kegiatan sering terlambat;
8. Belum adanya sinergi yang baik antara Dinas dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan antara pusat dengan pelaksana di Satker daerah/antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kabupaten atau Kota (khususnya TP Provinsi);
9. Pelelangan yang terpusat di ULP Pemprov/Pemkab/Pemkot masih memprioritaskan kegiatan bersumber dari APBD dan infrastruktur sehingga pelaksanaan kegiatan Dinas yang membidangi perkebunan mengantri dalam waktu yang lama;
10. Pelaksana kegiatan atau penggunaan anggaran yang tidak mengikuti ROPAK;
11. Terjadinya reorganisasi dalam tubuh dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten/Kota, yang berdampak pada kurang optimalnya manajemen pelaksanaan kegiatan;
12. Sebagian besar kegiatan pengembangan perkebunan tergantung pada musim tanam/iklim. Perubahan iklim global mengakibatkan ketidakjelasan rencana penanaman (menunggu musim);

13. Penentuan kegiatan dalam usulan proposal belum sepenuhnya memperhatikan arus bawah secara berjenjang dan koordinasi dalam penentuan kegiatan kurang optimal;
14. Unit cost yang terlalu kecil dan terlalu besar untuk daerah-daerah tertentu;
15. Pimpinan, penanggungjawab dan petugas/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya memahami Pedoman Teknis dan Pedoman-Pedoman lainnya;
16. Masih terbatasnya investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja;
17. Rencana kegiatan belum didukung oleh kebun induk sebagai sumber bahan untuk benih sebar/siap tanam;
18. Rencana Revitalisasi Pabrik Gula khususnya milik BUMN belum sinergis dengan rencana pengembangan tebu secara keseluruhan, karena ditangani oleh Instansi yang berbeda;
19. Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan dan RTRWP/RTRWK yang belum selesai;
20. Persyaratan bank dan syarat-syarat sebagai avalis yang menyulitkan perusahaan mitra;
21. Minimnya SDM Penyuluh Perkebunan padahal sangat dibutuhkan pekebun dalam pengembangan dan proses budidaya;
22. Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik;
23. Terjadinya alih fungsi pemanfaatan lahan;
24. Lembaga Penjaminan Kredit Petani belum memadai;
25. Kurangnya pendampingan pada petani yang telah mendapatkan pelatihan Pemberdayaan;

26. Implementasi Teknologi belum sepenuhnya diterapkan dan belum tersosialisasi dengan baik;
27. Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar petani belum memadai;
28. Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan;
29. Akan ditambahkan permasalah sesuai dengan LAKIN es II

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan Umum

Laporan Kinerja merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemenrintah, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja juga disusun berdasarkan atas Peratutan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang pengelolaan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian dan PMK 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan RKA-KL.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2017 yang disusun merupakan salah satu pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan pada tahun ke-3 (kedua) pada periode Pembangunan Perkebunan Tahun 2015-2019. Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2019 dalam Pembangunan Perkebunan yang dilaksanakan pada Tahun 2017.

Program Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015–2019 yang menjadi tanggung jawab adalah: ***"Peningkatan produksi, produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan"***. Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas

tanaman perkebunan melalui peremajaan, perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.

Program tersebut dilaksanakan dalam kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, perlindungan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perbenihan perkebunan, dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan, serta dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman.

Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perkebunan mendapat alokasi dana yang tertuang dalam DIPA/POK dengan total anggaran sebesar Rp. 1.148.531.631.000,-. Sebelum memperoleh APBN-P sebesar 657.756.465.000, anggaran Ditjen Perkebunan sebesar Rp. 490.963.166.000,-. Serapan anggaran program/kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 944.912.822.839,- atau 82,27% dibanding pagu anggaran Rp. 1.148.531.631.000,- dengan capaian fisik sebesar 90,08%.

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan utama pembangunan perkebunan yang dilaksanakan di 38 satker terdiri dari 1 satker Pusat, 4 satker UPT pusat dan 33 satker Dinas provinsi yang menangani perkebunan. Capaian kinerja fisik dan keuangan Tahun 2016 untuk 7 kegiatan utama Ditjen Perkebunan sebagai berikut:

1. Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan penyerapan anggaran sebesar 76,91% dan capaian fisik sebesar 83,37%.

2. Dukungan Perlindungan Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 92,75% dan capaian fisik sebesar 100,00%.
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan penyerapan anggaran sebesar 89,68% dan capaian fisik sebesar 100,00%.
4. Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih Serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan dengan penyerapan anggaran sebesar 93,86% dan capaian fisik sebesar 99,79%.
5. Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah dengan penyerapan anggaran sebesar 90,10% dan capaian fisik sebesar 96,08%.
6. Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan penyerapan sebesar 91,55% dan capaian fisik sebesar 99,05%.
7. Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan serapan anggaran sebesar 61,35% dan capaian fisik sebesar 77,29%.

Pencapaian kinerja program Ditjen Perkebunan tahun 2017 yang di tunjukkan melalui capaian kinerja indikator program dalam perjanjian kinerja Dirjen perkebunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja dibandingkan dengan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2017 yaitu :

a. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu dengan target sebesar 7,03% terealisasi sebesar (-3,64) atau terjadi penurunan produksi sebesar 3,64%. Dengan capaian ini berarti kinerja Ditjen Perkebunan dalam mencapai produksi tanaman

tebu mencapai 90,03% dari target PK, masuk dalam katagori berhasil.

b. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya dengan target sebesar 2,90% terealisasi sebesar (-0,73%) atau menurun sebesar 0,73%. Dengan capaian ini berarti kinerja Ditjen Perkebunan mencapai 96,43% dari target masuk dalam katagori berhasil.

Beberapa permasalahan tidak tercapainya sasaran program sebagai berikut Tidak tercapainya target produksi tebu (gula) tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan/hambatan/ kendala yang dihadapai dilapangan. Akar permasalahan tidak tercapainya produksi gula tebu dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) domain permasalahan, yaitu perubahan iklim atau anomali ilkim, Inovasi teknologi budidaya terbarukan belum optimal, terbatasnya varietas unggul baru yang adatif di lahan kering, dukungan pengolahan belum optimal, petani meragukan transparansi rendemen, dukungan Kebijakan dan regulasi belum tepat, distabilitas Harga petani, minimnya kuantitas dan kualitas SDM pertebuan, Sumber Daya Alam (SDA) terbatas untuk tebu, Minimnya investasi terhadap industri gula berbasis tebu.

Demikian juga Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya secara umum tidak mencapai target disebabkan oleh adanya permasalahan/hambatan/kendala antara lain: Anomali iklim,

Dukungan teknologi belum optimal, Harga kurang stabil, Minimnya dukungan Industri hilir, Minimnya dukungan industri hulu dan investasi yang belum berjalan sebagaimana mestinya.

2. Pencapaian kinerja Tahun 2017 jika dibandingkan terhadap pencapaian kinerja Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

a. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman tebu Tahun 2017 sebesar 90,03%, jika dibanding rata-rata pertumbuhan produksi Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Dibanding kinerja Tahun 2014 produksi tanaman tebu (GKP) mengalami penurunan sebesar (-7,52%).
- Dibanding kinerja Tahun 2015 produksi tanaman tebu (GKP) mengalami penurunan sebesar (-3,13%).
- Dibanding kinerja Tahun 2016 produksi tanaman tebu (GKP) mengalami peningkatan sebesar 11,32%.

b. Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya Tahun 2017 dibanding rata-rata pertumbuhan produksi Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut:

- Dibanding kinerja Tahun 2014 produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mengalami penurunan sebesar (-7,52%).
- Dibanding kinerja Tahun 2015 produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mengalami penurunan sebesar (-3,13%).
- Dibanding kinerja Tahun 2016 produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya mengalami peningkatan sebesar (-0,44%).

3. Pencapaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra

Target sasaran program (*outcomes*) sesuai Renstra Ditjen Perkebunan Tahun 2015-2019 merupakan target jangka menengah yang ditunjukkan oleh capaian produksi pada Tahun 2019. Oleh karena itu sesuai dengan target IKP Per Tahun dan di konversi menjadi target IKP sampai dengan tahun ini sedangkan pengukurannya ditentukan oleh tahun dasar dalam penentuan target IKP yaitu capaian produksi Tahun 2014. Berdasarkan analisis ini diperoleh capaian kinerja Tahun 2017 dibandingkan sasaran Renstra (target IKP sampai dengan Tahun 2019) sebagai berikut:

a. Pencapaian kinerja Tahun 2017, Rata-rata pertumbuhan produksi tebu sebesar 96,36% dibanding Tahun 2014 sebesar 89,05%, kinerja ini jika dibanding dengan sasaran Renstra Tahun 2019 mencapai 61,36%. Ini berarti untuk mencapai

target Renstra dengan waktu 2 tahun yang tersisa Ditjen perkebunan masih memiliki tanggung jawab sebesar 83,76% harus mampu meningkat produksi tebu (GKP).

b. Pencapaian kinerja Tahun 2017, Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman perkebunan unggulan lainnya 99,87%, dibanding Tahun 2014 sebesar 98,84%, kinerja ini jik= dibanding dengan sasaran Renstra Tahun 2019 mencapai 71,79%. Ini berarti untuk mencapai target Renstra dengan waktu 2 tahun yang tersisa Ditjen perkebunan masih memiliki tanggung jawab rata-rata meningkatkan komoditas perkebunan unggulan lainnya sebesar 58,02%.

4.2. Upaya Tindak Lanjut (disesuaikan kembali kalimatnya, permasalahan dan upaya tindak lanjut secara umum yang menyebabkan tidak tercapainya target)

Laporan ini diharapkan menjadi dokumen yang aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja Ditjen perkebunan. Oleh karena diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja dimasa yanga akan datang. Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu laporan dan subtansinya khususnya capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP lingkup Ditjen Perkebunan diharapkan mampu menginspirasi penaggungjawab kegiatan untuk meningkatkan kinerja dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada pertangguungjawaban kegiatan.

2. Selain permasalah teknis, permasalah umum yang sifatnya isu stratragis hendaknya menjadi acuan dalam mencari solusi dan upaya tindaklanjut, sehingga kinerja dapat ditingkatkan.
3. Laporan ini sebagai rangkuman dari kinerja dibawahnya hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja kegiatan. Hal ini disebabkan kinerja program merupakan dampak dari kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukungnya.
4. Indikator kinerja hendaknya menjadi daya dorong dan acuan dalam merumuskan jalannya pelaksanaan kegiatan sehingga titik kritis-titik kritsnya dapat terindentifikasi secara dini dan *up to date* sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilakukan.